PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG

LAPORAN
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2024

BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 dapat diselesaikan secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan LPPD ini merupakan tindak lanjut Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan

di Kota Singkawang selama Tahun 2024 kepada perangkat daerah, para *stakeholder* sebagai bahan evaluasi yang objektif dalam menilai kinerja Pemerintah Kota Singkawang pada semua urusan demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada para *stakeholder* dan segenap komponen masyarakat yang telah membantu dalam mewujudkan pembangunan di Kota Singkawang.

Semoga segala upaya yang telah dilakukan dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan selama ini selaras, serasi dan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat sebagaima tertuang dalam rencana pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singkawang, 26 Maret 2025

Wali Kota Singkawang

WALI KOTA SINGKAWANG

Tjhai Chui Mie

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 25

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 144

BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **147**

2.1 Capaian Kinerja Makro 147

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.. 148

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil 148

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pememrintahan 166

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 170

BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN **238**

BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL **239**

4.1 Urusan Pendidikan 239

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 239

4.1.2 Target Pencapaian 239
4.1.3 Realisasi 240
4.1.4 Alokasi Anggaran 240
4.1.5 Dukungan Personil 240
4.1.6 Permasalahan dan Solusi 241
4.2 Urusan Kesehatan 242
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 242
4.2.2 Target Pencapaian 242
4.2.3 Realisasi 243
4.2.4 Alokasi Anggaran 244
4.2.5 Dukungan Personil 245
4.2.6 Permasalahan dan Solusi 247
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 251
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 251
4.3.2 Target Pencapaian 251
4.3.3 Realisasi 251
4.3.4 Alokasi Anggaran 252
4.3.5 Dukungan Personil 252
4.3.6 Permasalahan dan Solusi 253
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 254
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 255
4.4.2 Target Pencapaian 255
4.4.3 Realisasi 255

4.4.4 Alokasi Anggaran 255
4.4.5 Dukungan Personil 256
4.4.6 Permasalahan dan Solusi 256
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 258
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 258
4.5.2 Target Pencapaian 258
4.5.3 Realisasi 259
4.5.4 Alokasi Anggaran 259
4.5.5 Dukungan Personil 260
4.5.6 Permasalahan dan Solusi 261
4.6 Urusan Sosial 265
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 265
4.6.2 Target Pencapaian 265
4.6.3 Realisasi 266
4.6.4 Alokasi Anggaran 267
4.6.5 Dukungan Personil 268
4.6.6 Permasalahan dan Solusi 268
4.7 Program dan Kegiatan 269
BAB V : PENUTUP 278

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Singkawang merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135/2094/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kota Singkawang. Peresmian pembentukannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, Kota Singkawang merupakan Ibu kota Kabupaten Sambas. Pada Tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kota Singkawang saat itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada Tahun 2001, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dimekarkan lagi menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.

Kota Singkawang sebagai daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, dalam lingkungan strategis globalisasi, Kota Singkawang sebagai daerah otonom diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimilikinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan itu untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah daerah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan, maka Wali Kota Singkawang selaku Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, yang merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Singkawang selama 1 (satu) Tahun Anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Wali Kota wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur setelah berakhirnya Tahun Anggaran dalam rangka penilaian capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Singkawang.

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Kota Singkawang terletak di Bagian Utara Provinsi Kalimantan Barat, terletak di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, yaitu pada koordinat 0^0 44' 55,85" - $01^0$01' 21,51" Lintang Utara dan 108^0 51' 47,6" - $109^0$10' 19" Bujur Timur dengan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, adalah 550,18 Km^2 atau sekitar 0,37% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Batas administrasi Kota Singkawang diuraikan sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Dari letak geografis tersebut maka posisi wilayah Kota Singkawang mempunyai karakteristik yang terbuka dengan akses yang lebih luas baik terhadap daerah pedalaman (Wilayah Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Sambas) maupun daerah pesisir pantai mulai dari wilayah Kabupaten Sambas hingga ibukota Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

2. Luas Wilayah

Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 26 kelurahan dengan luas administrasi pemerintahan 55.008,54 Ha dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Timur (ss.182,29,21 Ha) dan terkecil adalah kecamatan Singkawang Barat (1.368,25 Ha) dari luas administrasi pemerintahan Kota Singkawang

Gambar 1.1

Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)

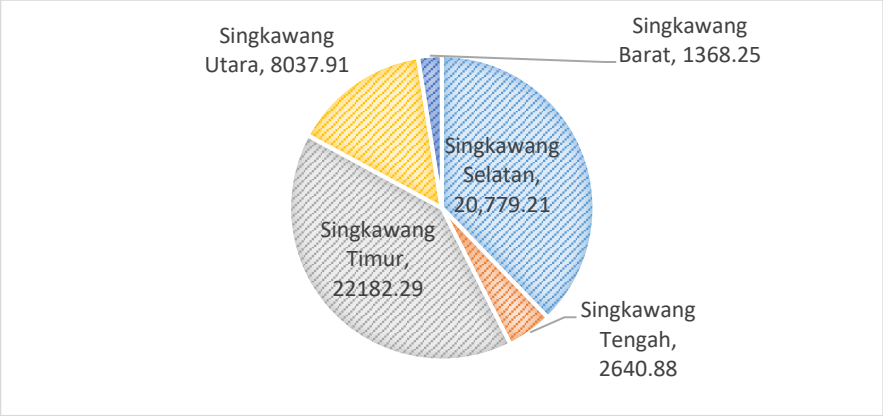

Sumber : Bagian Pemerintahan Kota Singkawang, diolah, 2024

Gambar 1.2

Peta Administrasi Kota Singkawang

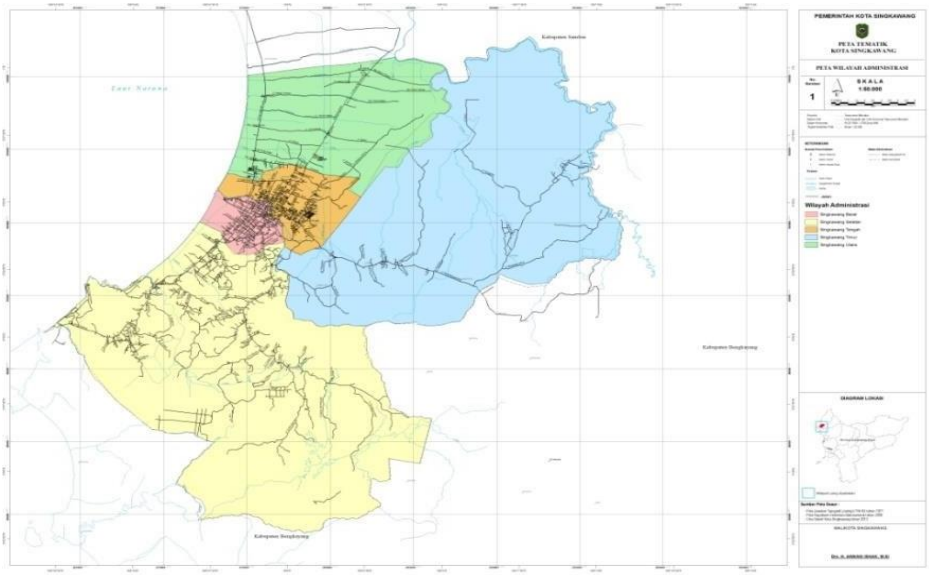

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Singkawang, 2024

3. Topografis

Berdasarkan topografi, wilayah Kota Singkawang sebagian besar merupakan dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedangkan bukit dan gunung seluas

18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Berdasarkan kelas lereng, sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang beradapada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen).

Tinggi wilayah di atas permukaan laut (dpl) menurut kecamatan di Kota Singkawang di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL)
menurut Kecamatan di Kota Singkawang

No.	Kecamatan	Tinggi (m)
(1)	(2)	(3)
1.	Singkawang Selatan	<500
2.	Singkawang Timur	>700
3.	Singkawang Utara	<500
4.	Singkawang Barat	<500
5.	Singkawang Tengah	<500

Sumber: BPS Kota Singkawang Tahun 2024

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, seperti yang tercantum dalam Propenas bahwa manusia Indonesia atau penduduk disebut sebagai modal dasar disamping modal dasar lainnya, apabila mereka dapat dibina serta dikerahkan secara efektif. Namun penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan apabila tidak diseimbangkan dengan kualitas, baik kualitas pendidikan, kesehatan mental maupun fisik. Karena itu penduduk yang banyak bukan merupakan jaminan bagi tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, jumlah penduduk Kota Singkawang yang memiliki NIK

sampai dengan Desember 2024 sebanyak 249.954 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan kelompok Pendidikan diuraikan sebagai berikut :

1. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

Komposisi penduduk Kota Singkawang berdasarkan jenis kelamin meliputi laki-laki berjumlah 127.751 jiwa atau 51,11% dan perempuan berjumlah 122.203 jiwa atau 48,89% dari total penduduk, Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kelurahan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Sedau yaitu 37.688 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Tengah yaitu 1.944 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berdasarkan kecamatan terdapat di Kecamatan Singkawang Tengah sejumlah 74.750 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Singkawang Timur sejumlah 25.127 Jiwa. Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut;

Gambar 1.3
Data Agregat Penduduk Kota Singkawang
Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 31 Desember 2024

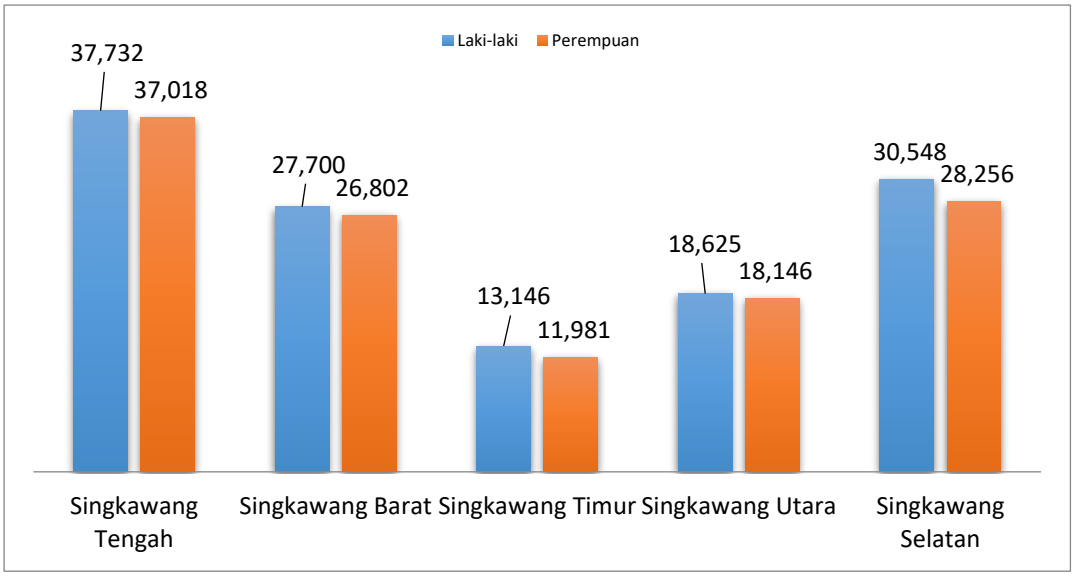

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2024

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Singkawang pada Tahun 2024 berdasarkan kelompok usia, didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun dengan sejumlah 160.274 jiwa atau 66,19%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 63.274 jiwa atau 26,13% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 18.598 jiwa atau 7,69%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (*stasioner*). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Singkawang pertumbuhan penduduknya kecil yang disebabkan angka kelahiran dan angka kematian hampir mendekati seimbang.

Gambar 1.4
Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024

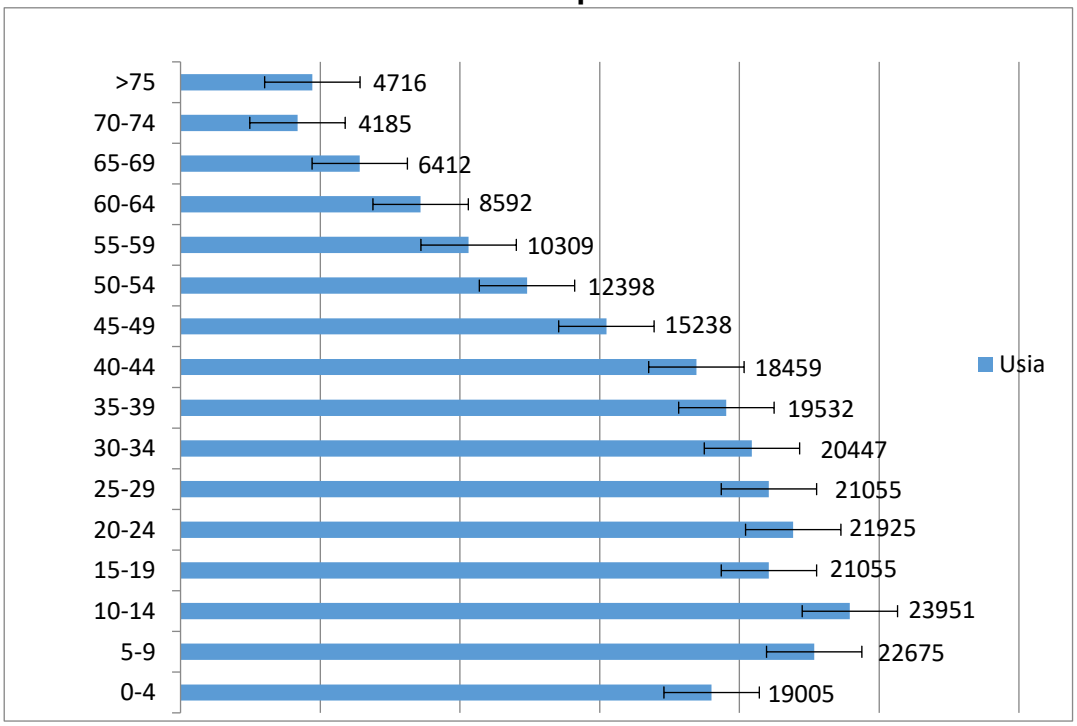

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2024

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan menunjukan bahwa pada tingkat Pendidikan untuk kategori tingkat tinggi (diploma dan sarjana) dan tertinggi didominasi Tingkat Pendidikan Strata I sebanyak 9.586 jiwa, diikuti Diploma III/ Akademi sebanyak 3.291 jiwa, Diploma I/ II sebanyak 744 jiwa, Strata II sebanyak 525 jiwa dan Strata III sebanyak 19 jiwa. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tidak/belum bersekolah sebanyak 76.961 jiwa, Tingkat Pendidikan Tamat SD/ Sederajat sebanyak 52.932 jiwa, SMA/sederajat sebanyak 42.070 jiwa, tidak/belum Tamat SD sebanyak 35.926 dan Tamat SMP/sederajat sebanyak 27.900 jiwa.

Gambar 1.5
Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pendidikan Tahun 2024

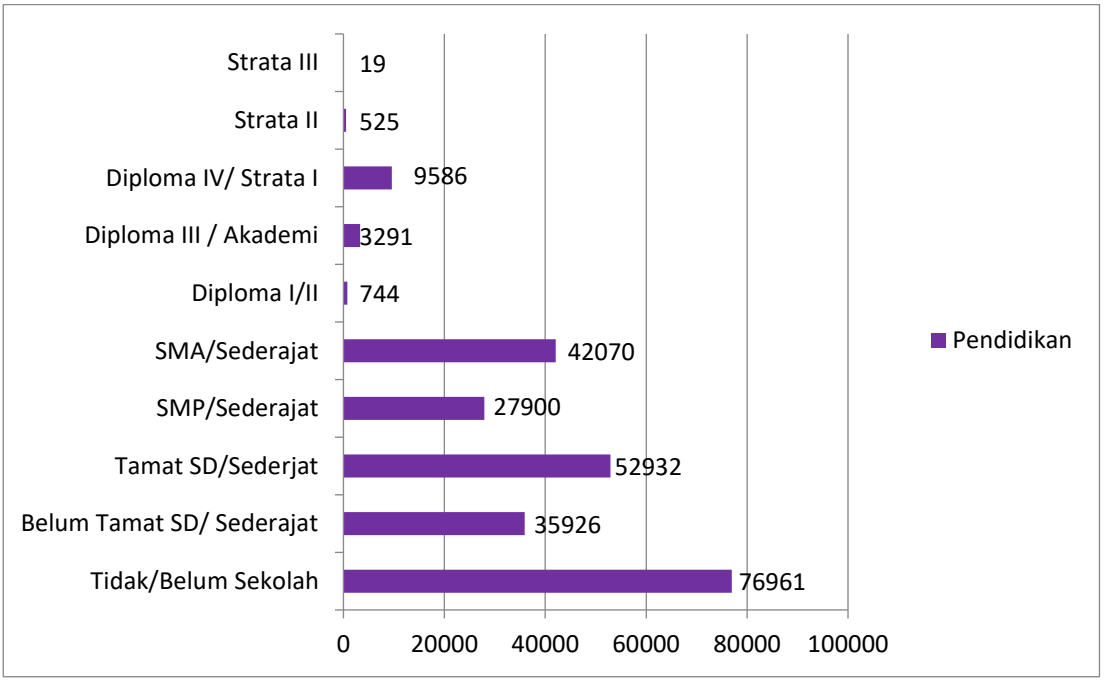

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Silpil, diolah, 2024

4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat Pekerjaan menunjukan bahwa pada tingkat Pekerjaan tertinggi didominasi Belum / tidak Bekerja sebanyak 78597 jiwa, diikuti Wiraswasta sebanyak 51.859 jiwa, Ibu Rumah Tangga sebanyak 49071 jiwa, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 38.465 jiwa dan Petani/Pekebun sebanyak 9.551 jiwa. Sedangkan untuk pekerjaan lainnya (POLRI, Perdagangan, Nelayan Perikanan, Industri, Konstruksi, Transportasi, Karyawan BUMN,Karyawan BUMD, Karyawan Honorer, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan Perikanan, Buruh Peternakan, Pembantu Rumah Tangga, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu,Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi,Penata Rias, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Pendeta, Pastor, Wartawan, Ustadz Mubaligh, Juru Masak, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, Dosen, Guru, Pengacara, Notaris, Konsultan, Dokter, Bidan, Perawat, Apoteker, Pelaut, Peneliti, Sopir, Paranormal, Perdagangan, Perangkat Desa, Biarawati dan Lainnya) sebanyak 22.497 jiwa. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar dan tabel di bawah ini:

Gambar 1.6
Rincian Komposisi Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan Tahun 2024

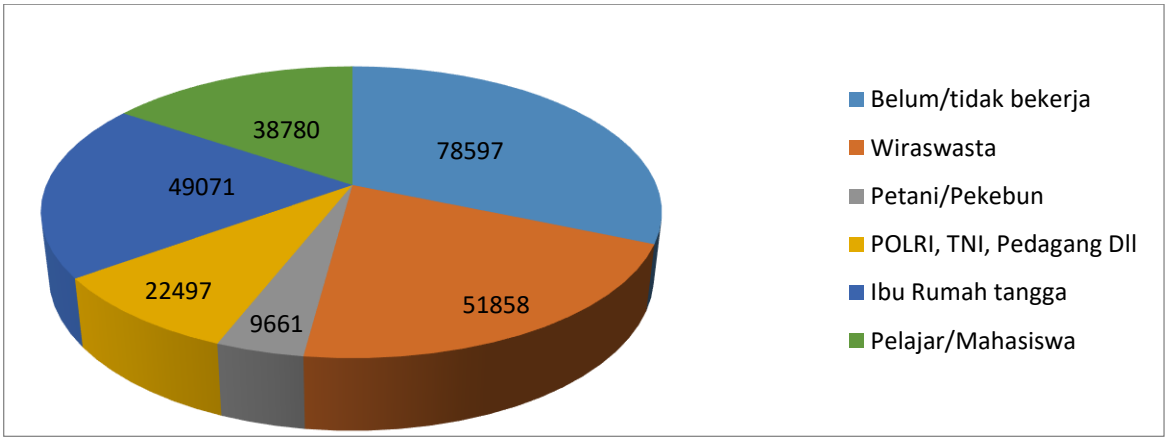

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Silpil, diolah, 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Sampai dengan Tahun 2024 Kota Singkawang secara administratif pemerintahan terbagi kedalam 5 Kecamatan dan 26 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Singkawang Tengah, terdiri atas:
   a. Kelurahan Roban
   b. Kelurahan Condong
   c. Kelurahan Sekip Lama
   d. Kelurahan Jawa
   e. Kelurahan Bukit Batu
   f. Kelurahan Sungai Wie
2. Kecamatan Singkawang Barat, terdiri atas :
   a. Kelurahan Pasiran
   b. Kelurahan Melayu
   c. Kelurahan Tengah
   d. Kelurahan Kuala
3. Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri atas :
   a. Kelurahan Sedau
   b. Kelurahan Sagatani
   c. Kelurahan Sijangkung
   d. Kelurahan Pangmilang
4. Kecamatan Singkawang Utara, terdiri atas :
   a. Kelurahan Sungai Garam Hilir
   b. Kelurahan Naram
   c. Kelurahan Sungai Bulan
   d. Kelurahan Sungai Rasau
   e. Kelurahan Setapuk Kecil
   f. Kelurahan Setapuk Besar
   g. Kelurahan Semelagi Kecil
5. Kecamatan Singkawang Timur, terdiri atas :
   a. Kelurahan Pajintan

b. Kelurahan Nyarumkop
c. Kelurahan Mayasopa
d. Kelurahan Bagak Sahwa
e. Kelurahan Sanggau Kulor

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan perangkat daerah yang dapat memenuhi asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), telah dilakukan penyesuaian atas Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82), yang meliputi 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 6 (enam) Badan, dan 5 (lima) Kecamatan serta 26 (dua puluh enam) kelurahan sebagai perangkat kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

Dasar Pemberntukan Perangkat Daeran Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1.	Sekretariat Daerah	Perda No. 3 Tahun 2016
2.	Sekretariat DPRD	Perda No. 3 Tahun 2016

3.	Inspektorat Daerah	Perda No. 3 Tahun 2016
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perda No. 3 Tahun 2016
5.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Perda No. 3 Tahun 2016
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda No. 3 Tahun 2016
7.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Perda No. 3 Tahun 2016
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda No. 3 Tahun 2016
9.	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Perda No. 3 Tahun 2016
10.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Perda No. 3 Tahun 2016
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Perda No. 3 Tahun 2016
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda No. 3 Tahun 2016
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perda No. 3 Tahun 2016
14.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perda No. 3 Tahun 2016
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perda No. 3 Tahun 2016
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda No. 3 Tahun 2016
17.	Dinas Perhubungan	Perda No. 3 Tahun 2016
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perda No. 3 Tahun 2016
19.	Badan Pendapatan Daerah	Perda No 5 Tahun 2022
20.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Perda No 5 Tahun 2022
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda No. 3 Tahun 2016
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda No. 3 Tahun 2016
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No. 3 Tahun 2012
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda No. 3 Tahun 2016
25.	Kecamatan	Perda No. 3 Tahun 2016

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Kota Singkawang didukung Aparatur Sipil Negara berdassarkan urusan dan fungsi masing-masing dalam pemerintahan. Adapun Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah dirincikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang
Berdasarkan Urusan

NO	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang	13	16	46	75
2	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang	4	4	13	21
3	Inspektorat Daerah	Fungsi Pengawasan	6	29	6	41
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	13	9	22	44
5	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	8	13	20	41
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	10	42	61
7	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Urusan Perumahan dan Permukiman, Urusan Pertanahan	7	6	16	29
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan PPPA	6	6	11	23
9	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Urusan Penanaman Modal, Urusan Tenaga Kerja	8	9	15	32

10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Urusan Pertanian, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Kelautan Dan Perikanan	10	34	19	63
11	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	10	6	49	65
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8	3	8	19
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Komunikasi Dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian	9	4	17	30
14	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi Dan Ukm	9	7	20	36
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Urusan Pariwisata, Urusan Pemuda Dan Olahraga	6	2	13	21
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan	4	3	5	12
17	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	15	6	39	60
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Fungsi Penunjang Bidang Litbang	6	9	11	26
19	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Bidang Pendapatan	15	0	14	29
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Bidang Keuangan	15	2	18	35
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Fungsi Penunjang Bidang Diklat	6	5	18	29
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	5	2	12	19
24	Badan Penanggulangan	Fungsi Penunjang Bidang Kebencanaan	4	0	7	11

	Bencana Daerah					
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Trantib, Sub Urusan Kebakaran	10	64	7	81
26	Kecamatan Singkawang Barat	Fungsi Pendukung	6	0	7	13
27	Kecamatan Singkawang Timur	Fungsi Pendukung	6	0	8	14
28	Kecamatan Singkawang Tengah	Fungsi Pendukung	7	0	5	12
29	Kecamatan Singkawang Selatan	Fungsi Pendukung	6	0	6	12
30	Kecamatan Singkawang Utara	Fungsi Pendukung	6	0	4	10

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diolah 2024

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Wali Kota Singkawang didukung aparatur yang berjumlah 2.867 orang, diluar tenaga Non ASN. Jumlah pegawai mayoritas adalah golongan III sebanyak 2.028 orang. Adapun komposisi pegawai menurut Golongan secara rinci yaitu:

Tabel 1.4

Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang

Berdasarkan Golongan

DATA KEPEGAWAIAN	JUMLAH/TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Golongan IV/a – IV/d	736	652	631	512	443
Golongan III/a – III/d	2063	1999	2005	2109	2028
Golongan II/a – II/d	477	456	451	416	397
Golongan I/a – I/d	48	40	39	15	9
JUMLAH	**3324**	**3147**	**3126**	**3052**	**2867**

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Selain PNS, adapula Pegawai yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang yaitu PPPK. PPPK merupakan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja. Berdasarkan golongan PPPK terdapat 1 orang golongan V, 107 orang golongan VII, 652 golongan IX , 57 orang golongan X dan 1 orang golongan XIsehingga total PPPK berdasarkan golongan sejumlah 818 orang. Adapun komposisi pegawai menurut Golongan secara rinci seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.5

Daftar Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Singkawang
Berdasarkan Golongan

Golongan	JUMLAH/JENIS KELAMIN		TOTAL
	L	P	
Golongan XII	0	0	0
Golongan XI	1	0	1
Golongan X	26	31	107
Golongan IX	199	453	652
Golongan VIII	0	0	0
Golongan VII	34	73	57
Golongan VI	0	0	0
Golongan V	1	0	1
JUMLAH	**261**	**557**	**818**

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga dibagi menjadi jabatan-jabatan tertentu. Jabatan tersebut seperti tenaga medis, tenaga pendidikan/guru, tenaga teknis dan banyak yang lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Rincian PPPK berdasarkan jabatannya, dijabarkan dalam bentuk tabel yaitu :

Tabel 1.6
Data PPPK Pemerintah Kota Singkawang
Menurut Jabatan

JABATAN	2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
GURU	163	412	575
TENAGA MEDIS	59	112	171
TEKNIS	39	33	72
JUMLAH	261	557	818

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dijabarkan jumlah PPPK berdasarkan jabatan berupa guru sejumlah 163 laki-laki dan 412 perempuan, sedangkan tenaga medis hanya berjumlah 59 orang laki-laki dan 112 orang Perempuan, dan tenaga teknis sejumlah 39 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Maka PPPK menurut jabatan tahun 2024 sebanyak 818 orang.

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Pendapatan

Tabel 1.7
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Pendapatan

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	251.573.183.462,00	272.080.297.920,58	**108,15**
Pajak Daerah	92.155.000.000,00	91.721.181.670,27	99,53
Retribusi Daerah	8.948.857.780,00	12.980.899.365,30	145,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.824.971.230,00	10.824.971.230,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	139.644.354.452,00	156.553.245.655,01	112,11
Pendapatan Transfer	760.705.274.186,00	740.698.717.220,00	97,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	680.192.849.052,00	671.859.234.528,00	98,77

Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.512.425.134,00	68.839.482.692,00	85,50
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**-**	**-**	**-**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	**-**	**-**	**-**

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kota Singkawang Tahun 2024

2. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

Tabel 1.8
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
Belanja Daerah	**1.048.689.016.444,45**	**999.666.500.730,71**	**95,33**
Belanja Operasi	**846.156.873.869,00**	**826.423.324.382,83**	**95,58**
Belanja Pegawai	421.788.863.308,45	395.696.157.612,00	93,81
Belanja Barang dan Jasa	379.959.579.454,00	367.678.073.217,83	96,77
Belanja Hibah	60.848.601.130,00	61.150.169.553,00	100,50
Belanja Bantuan Sosial	**2.039.320.000,00**	**1.898.924.000,00**	**93,12**
Belanja Modal	**182.168.622.708,00**	**173.232.176.347,88**	**95,09**

Belanja Modal Tanah	989.114.000,00	986.481.000,00	99,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.840.017.461,00	37.869.091.913,00	88,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.991.237.519,00	33.103.678.704,00	94,61
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	86.960.971.534,00	85.792.024.161,88	98,66
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.284.782.194,00	15.378.450.569,00	94,43
Belanja Modal Aset Lainnya	102.500.000,00	102.450.000,00	99,95
Belanja Tidak Terduga	**1.884.029.844,00**	**11.000.000,00**	**0,58**

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kota Singkawang Tahun 2024

3. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1.9
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Pembiayaan

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%
Penerimaan Pembiayaan	69.188.547.164,45	69.188.547.164,45	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	32.777.988.368,00	32.777.988.368,00	**100,00**

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang Tahun 2024

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel 1.10
Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Singkawang
Tahun 2024

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	Urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	87,175,274,579.00	85,784,181,277.37
2	Urusan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya	1.859.686.292	1.777.528.696

		Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
3	Urusan Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4.040.224.820	4.025.755.040
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	12.729.752.150	12.693.969.880
		Program Penyelengara Jalan	34.304.471.671	33.900.959.752
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	63.216.622	34.962.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.438.617.931	10.334.973.827
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.403.872.245	2.392.616.428
		Program Penataan Bangunan Gedung	11.381.642.760	11.230.693.897
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.137.892.950	2.118.016.821
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	854.840.660	851.072.193
4	Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	123.067.360	57.610.400

5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	926.527.000	923.481.492
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.	10.000.000	9.862.722
6	Urusan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	103.923.278	98.830.050
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.459.317.767	1.314.628.348
		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 57.900.700	Rp. 43.887.500
7	Urusan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	456,716,956	451,615,174
		Program Penanganan Bencana	46,596,000	37,766,700
		Program Penanganan Bencana	15,140,000	9,603,200
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	62,702,200	62,702,200

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan struktur perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan RPD Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang dipimpin oleh pejabat daerah dikarenakan berakhirnya masa jabatan Kepapa Daerah periode 2017-2022 pada Tahun 2022, sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Perubahan RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025; Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022; RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; Isu-isu strategis yang berkembang; Kebijakan nasional; dan Regulasi yang berlaku.

Pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai Tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebiajakan nasional.

Terkait dengan uraian di atas dan berdasarkan hasil analisa dan telaahan terhadap data dan informasi yang ada, maka permasalahan pembangunan daerah di Kota Singkawang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah. Penyebab utamanya adalah berkaitan dengan menurunnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD. Pada tingkat PAUD, akar masalah yang paling menonjol adalah standardisasi pelaksanaan sekolah PAUD yang belum maksimal. Selama ini, pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah. Pada saat yang sama, proses penyediaan sarana dan prasarana serta standardisasi pendidikan oleh Dinas belum maksimal.

Tabel 1.11
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah	Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD	Belum maksimalnya koordinasi dengan sekolah-sekolah PAUD non-pemerintah
		Standardisasi penyelenggaraan PAUD belum terlaksana sesuai standar nasional.
		Kurangnya dorongan pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD
		Belum optimalnya ketersediaan alat peraga pendidikan tingkat PAUD (alat permainan edukatif,

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya gedung sekolah PAUD yang memadai
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya penerapan pembelajaran berbasis digital
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD dan SMP	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD
		Masih adanya sarana pendidikan tingkat SMP yang perlu diperbaharui
		Belum optimalnya upaya pengintegrasian data siswa antara sekolah dan dinas
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Cakupan ketersediaan sekolah kesetaraan belum merata
		Belum optimalnya diversifikasi kompetensi pada sekolah penyetaraan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

b) Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang masih menyisakan beberapa permasalahan umum seperti kematian ibu, kematian bayi, penanganan gizi buruk dan

penanganan stunting. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang Tahun 2024.

Tabel 1.12
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Masih adanya balita dengan status gizi buruk dan stunting	Belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak
	Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI)	Deteksi dini hipertensi dalam kehamilan belum optimal
		Rendahnya sosialisasi kepada ibu hamil
		Sistem rujukan dan jaringan rujukan belum optimal
	Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000	Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000
		Rendahnya konseling gizi ibu hamil, anemia dan KEK
		Masih adanya Bayi Berat Lahir Rendah
		Sistem rujukan dan jaringan rujukan belum optimal
		Rendahnya koordinasi lintas sektor

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya temuan penyakit menular (TBC, dll)	Belum optimalnya pemenuhan gizi
		Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
	Masih tingginya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Diare, polio dll)	Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
		Belum optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular
	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas Kesehatan	Masih kurangnya ketersediaan dan kompetensi tenaga Kesehatan
		Belum optimalnya peran swasta dalam pembangunan Kesehatan
		Rendahnya Rasio Posyandu per 100 Balita
		Rendahnya mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Singkawang masih dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar

belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan irigasi, dan drainase yang diperlukan untuk penanganan/pengendalian banjir. Begitu juga pembangunan maupun peningkatan jalan sebagai salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Singkawang juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air.

Tabel 1.13
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar	Belum optimalnye penyelenggaran jalan	Masih adanya jalan dengan kualitas rendah
	Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase/irigasi	belum adanya masterplan pembangunan drainase/irigasi
		belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air minum	Belum optimalnya pembangunan jaringan air bersih
Masih adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan	Masih kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kota

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pengendalian tata ruang	
Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak	Belum optimalnya ketersediaan sanitasi layak	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi sehat dan layak

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Data pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukan bahwa adanya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan tingkat capaian sebesar 97,91%. Namun untuk kawasan kumuh di Kota Singkawang, data menunjukan dari total kawasan kumuh hanya tertangani sekitar 50,08 % pada Tahun 2023. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

Tabel 1.14
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasanan sarana	Terbatasnya akses prasanan dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana,	Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beerapa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	Utilitas Umum (PSU)	perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh baru)
		Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Masih kurangnya akses terhadap sanitasi layak
		Masih kurangnya akses terhadap air bersih
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kota Singkawang, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama serta penanggulangan bencana. Pada aspek persentase penegakan produk hukum di Kota Singkawang, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Upaya peningkatan penegakan produk hukum selama ini terkendala pada belum optimalnya sinergi kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait. Berikut

adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketenteraman Ketertiban Umum di Kota Singkawang pada Tahun 2023.

Tabel 1.15
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya penegakan produk hukum (Reklame dan PKL)	Belum adanya sinergi kewenangan antar Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
Belum optimalnya kualitas penanganan bencana	Belum optimalnya upaya efektivitas pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana	Belum optimalnya pengembangan sistim informasi kebencanaan
		Belum memadainya kapasitas Pendidikan dan pelatihan SDM Kebencanaan
		Belum memadainya ketersediaan peralatan dan logistik Kebencanaan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

f) Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Kota Singkawang sudah melaksanakan fungsi

pelayanan sosial, namun upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Dilihat dari persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 4,83% pada Tahun 2001 menjadi 4,67% pada Tahun 2022. Begitu juga mengenai jumlah penduduk miskin menurun dari 11,16 ribu pada Tahun 2018 menjadi 10,82 ribu orang.

Jenis PPKS paling banyak di Daerah diantaranya keluarga miskin, wanita korban kekerasan, tuna tubuh, lanjut usia terlantar, anak terlantar, balita terlantar dan sebagainya. Artinya masih perlu upaya peningkatan cakupan pelayanan PPKS untuk periode selanjutnya.

Tabel 1.16
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan sosial pada PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Belum optimalnya pengelolaan data PPKS	Validitas DTKS yang masih belum optimal
		Belum optimalnya peranan stakeholder di tingkat kelurahan dalam verifikasi dan validasi data
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial non pemerintah
		belum tersedianya akses informasi satu data PPKS
		belum tersedianya data kemiskinan versi daerah
	belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dan linjamsos	pelayanan administrasi kependudukan bagi PPKS/PSKS yang belum terakses dengan baik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dasar secara menyeluruh terhadap PPKS	kurangnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan bagi PPKS
		belum terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan rehablitasi sosial bagi PPKS antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesbilitas lainnya
		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan rehabilitasi sosial
		keterbatasan LKS yang memberikan pelayanan Rehsos
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam rehsos
		belum terpenuhinya pelayanan bimbingan mental, fisik, spritual dan sosial terhadap PPKS maupun Keluarga PPKS
		terbatasanya pelayanan pengadauan dan data PPKS
		belum optimalnya penjangkauan, kedarutan dan penelusuran keluarga PPKS
		belum adanya kerjasama secara formal antara pemerintah daerah dengan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum optimalnya penanganan kebencanaan bagi masyarakat
		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan penangan kebencanaan
		belum terpenuhinya kebutuhan dasar penanganan kebencanaan antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesbilitas lainnya
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam penanganan kebencanaan
		belum optimal penyelenggaran pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
	belum optimalnya pemberdayaan sosial PPKS/PPKS	kurang pelatihan kewirausahaan bagi PPKS
		belum tersedianya modal usaha bagi PPKS
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam pemberdayaan sosial
belum optimalnya peran PSKS (potensi sumber	kurangnya pengembangan kapsitas PSKS	minimnya pengetahuan PSKS dalam menangani permasalahan sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Minimnya ketrampilan dan keahlian dalam penanganan peyelenggaraan kesejahteraan sosial
		kurangannya PSKS dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		minimnya perekrutan tenaga terampil (pekerja sosial profesional)
		belum terkoordinasinya atau tercatat secara administrasi para pengiat masalah kesejahteraan sosial
		kurangnya penghargaan bagi mereka pengiat masalah kesejahteraan sosial
	Belum optimalnya pengumpulan sumbangan dalam daerah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang tata cara pengumpulan sumbangan untuk kesejahteraan sosial
		Belum tersedianya aturan daerah tentang pengumpulan sumbangan
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan	Kurangnya situs-situs yang memberikan informasi mengenai para pahlawan
Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Singkawang masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Data pada Tahun 2022 berdasarkan Singkawang Dalam BPS menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Singkawang sebesar 68,86%. Hal tersebut dari 100 penduduk Kota Singkawang yang berumur 15 tahun ke atas, terdapat 68 sampai 69 orang tersedia untuk melakukan produksi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kota Singkawang pada Tahun 2022 sebesar 8,63%.

Adapun kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja pada Tahun 2022 didominasi oleh lulusan setara SD sebesar 43,97%, SMP 11,52%, SMK/SMA 29,33%, dan sarjana/diploma 15,18 %. Hal tersebut menunjukan masih adanya tantangan untuk menyerap penduduk usia kerja agar mampu bekerja serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Maka dari itu, ada beberapa tantangan urusan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan yaitu:

Tabel 1.17
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya serapan tenaga kerja	masih adanya kesenjangan kualifikasi/kompetensi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	Belum tersedianya data yang telah divalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja
		belum adanya kerja sama (MOU) dengan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas penyedian Instruktur dan penempatan kerja bagi yang sudah mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya fasilitasi bursa kerja bagi pencari kerja

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu

kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan daerah yang memperhatikan isu gender adalah Partisipasi angkatan kerja perempuan, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan.

Tabel 1.18
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Belum Adanya RAD KLA	Belum optimalnya data gender dan anak
	belum optimalnya pelibatan Lembaga partisipasi anak	Partisipasi anak belum menjadi arus utama dalam pembangunan.
		Belum optimalnya perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

c) Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kota Singkawang masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya daerah rawan pangan meskipun dari sisi cadangan pangan tercukupi. Hal lain adalah keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata, belum

optimalnya penganekaragaman pangan lokal yang disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
		Perlunya data ketersediaan pangan yang akurat
	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
		Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
	Belum optimalnya penganekaragaman dan keamanan pangan lokal	Belum optimalnya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum
		Kurangnya pengelolaan lahan pekarangan untuk diversifikasi tanaman pangan
		Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai
		Belum terlaksananya sertifikasi uji mutu komoditas beras

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

d) Pertanahan

Masih terjadinya konfilik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulakan konflik sengketa perkara pertanahan. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.20
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan pertanahan	Masih belum optimalnya pengelolaan ijin lokasi	Belum tersedianya data base pertanahan
		Belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan wali kota tentang ijin membuka tanah negara
	Belum optimalnya redristibusi tanah	Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
	Masih adanya konflik tanah	Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah
		Belum tuntasnya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong
		Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang
		Belum tersedianya data base pertanahan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

e) Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu cita-cita pembangunan. Kualitas lingkungan hidup di Kota Singkawang adalah 65,96 pada Tahun 2024. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan lingkungan hidup adalah masih rendahnya Indeks Kualitas Lahan yang mencapai 35,99 atau berada pada kriteria kurang pada tahun 2043. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 1.21
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas lingkungan (air, udara, lahan)	Belum maksimalnya pengurangan dan penanganan sampah	Belum maksimalnya upaya pengurangan sampah di masyarakat
		Belum seimbangnya jumlah sarpras yang tersedia dengan jumlah permintaan pelayanan masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum maksimalnya pengendalian limbah B3	Kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha / kegiatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan
		Belum seimbangnya jumlah sapras yang tersedia dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan
		Tingginya biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga
		Sulitnya proses perijinan pengelolaan limbah B3
	Lambatnya proses perijinan LH	Kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha / kegiatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan
		Belum seimbangnya jumlah sapras yang tersedia dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan
		Tingginya biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga
		Sulitnya proses perijinan pengelolaan limbah B3
	Lambatnya proses perizinan LH	Perijinan LH yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
		Belum maksimalnya sosialisasi dan Bimtek terhadap pelaku usaha
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses perijinan LH

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan yang terantum dalam dokumen lingkungan	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menidaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan
		Penegakan hukum lingkungan belum terpadu antar bidang urusan
	Masih adanya Pencemaran air	Pembuangan limbah cair langsung ke badan sungai
		Masih terdapatnya pembuangan sampah dibadan sungai
		Masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai
	Masih adanya Pencemaran udara	Masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan
	Masih adanya Pencemaran Tanah	Masih adanya pembuangan limbah B3 cair ke permukaan tanah atau ke badan air
	Kerusakan lingkungan (lahan dan hutan)	Masih banyaknya galian tanah, pasir, batu dan emas tanpa ijin
		Masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan
Perubahan iklim	Alih fungsi lahan	Berkurangnya tutupan lahan
		Belum taatnya terhadap RTRW kota
		Belum maksimalnya penyediaan sarpras RTH

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan lain yang perlu menjadi fokus pembangunan adalah terkait pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, kelahiran anak dan menekan angka kematian ibu. Beberapa permasalahan terkait pengendalian penduduk dan KB di Kota Singkawang adalah terkait partisipasi penduduk dalam program KB yang masih belum optimal walaupun laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang sudah semakin menurun sejak sepuluh tahun sebelumnya. Adapun pada Tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,61% dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,55%. Berikut adalah rumusan masalah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

Tabel 1.22
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Penyelenggaraan program KB	Angka putus pakai (Drop Out) kontrasepsinya masih tinggi	Pemakaian kontrasepsi jangka panjang masih rendah
	Masih tingginya unmeetneed (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Persepsi masyarakat terhadap KB masih kurang baik
	Peserta KB aktif belum optimal	Data pencatatan belum optimal
		Masih adanya ketidakpahaman masyarakat tentang KB

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

g) Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. berkurangnya jumlah barang dan kapal yang masuk ke Singkawang akibat alur yang dangkal sehingga kapal hanya mengandalkan kondisi air laut pasang, hal tersebut merupakan faktor menurunnya minat kapal - kapal yang bersandar di Singkawang. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.23
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kenyamanan dan Keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU)
		Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan
	Belum memadainya transportasi umum	Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas
		Semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

h) Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa

persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi berkaitan dengan jaringan fiber optik yang rawan terkena gangguan karena masih menggunakan jalur atas. Selain itu, jaringan fiber optik juga belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 1.24
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi informasi yang terintegrasi	Sarana pengelolaan Jaringan komunikasi belum optimal	Fiber optik masih menggunakan jalur atas sehingga berisiko terkena gangguan
		Data fiber optik masih terbatas dan tersebar di masing-masing internal Perangkat Daerah

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

i) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UMKM belum menunjukan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UMKM yang ada di Kota Singkawang yang masih terhambat akibat sulitnya perizinan dan juga akses permodalan. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UMKM di Kota Singkawang antara lain:

Tabel 1.25
Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas pertumbuhan koperasi baru	Belum optimalnya pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi	Jumlah tenaga pendamping yang terbatas
		Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
		Minimnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi
		Terdapat permasalahan internal koperasi
	Belum optimalnya intervensi pemerintah	Belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembagian sektor-sektor usaha koperasi
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemulihan usaha koperasi	Terbatasnya jumlah bantuan pendanaan bagi koperasi yang berada dalam kondisi darurat tertentu
Belum optimalnya kapasitas kesehatan koperasi	Belum optimalnya pelaporan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi	Belum optimalnya kualitas SDM koperasi dalam penyusunan pelaporan
		Belum optimalnya program pelaporan yang terintegrasi
Belum optimalnya kapasitas UMKM yang memiliki izin	Belum optimalnya pendampingan bagi UMKM yang akan mengurus izin usaha berbasis resiko	Kurangnya jumlah pendamping UMKM
		Kurang optimalnya sosialisasi pengurusan NPWP
		Belum tersedianya program pendampingan pengurusan NIB di tingkat kelurahan
	Belum optimalnya data UMKM	Belum optimalnya proses pengumpulan, verifikasi dan pembaharuan dan usaha kecil

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

j) Penanaman Modal

Urusan penanaman modal pada periode Tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 jumlah investasi meningkat sebesar 206,33%. Urusan penanaman modal menjadi prioritas pembangunan Kota Singkawang pada beberapa tahun ke depan, karena merupakan salah satu faktor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Singkawang, yaitu:

Tabel 1.26
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor	Masih perlunya pencipataan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penyediaan ruang untuk investasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
		Belum optimalnya penyediaan dan akses peta potensi investasi
Masih perlunya penguatan kelembagaan perizinan satu pintu	Masih perlunya penguatan tim teknis perizinan	Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah
	Masih perlunya peningakatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi	Masih perlunya peningkatan aplikasi perizinan dan pemantauan proses perizinan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

k) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Singkawang. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real.

Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kota Singkawang secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya event-event olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.

Tabel 1.27
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Belum optimalnya pendataan organisasi kepemudaan
		Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif
		Diversifikasi peran organisasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kepemudaan belum optimal
	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana, Pengembangan SDM keolahragaan	Persebaran fasilitas olahraga tidak merata
		Sarana keolahragaan masih terbatas pada olahraga tertentu, seperti sepak bola dan voli
		Pembibitan atlet masih belum terstruktur
		Tidak adanya kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

I) Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kota Singkawang masih belum optimal. Hingga saat ini, fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab utama dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya kapasitas kelembagaan baik dari sisi kewenangan maupun SDM.

Tabel 1.28
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi	Belum optimalnya Kapasitas kelembagaan statistik	Adanya tumpang tindih kewenangan dengan BPS terutama Seksi Statistik
		Kurangnya kompetensi SDM pengelola statistik

		Belum optimalnya standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

m) Persandian

Di Kota Singkawang, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim.

Tabel 1.29
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian (seperti tanda tangan elektronik, tata naskah dinas, tanda tangan, kearsipan) belum optimal	Kurangnya SDM yang memadai dibidang persandian
		Masih perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman terkait urgensi persandian

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

n) Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, minimnya upaya menjadikan budaya lokal sebagai katalisator pembangunan daerah menjadi masalah pokok. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bahan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini belum tercapai karena situs-situs

kebudayaan belum dijadikan sebagai objek pembangunan pariwisata.

Tabel 1.30
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlu ditingkatkannya budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya	Masih perlu ditingkatkannya fasilitasi terhadap kelompok kesenian
		Masih perlunya revitalisasi nilai tradisi
		Belum optimalnya inventarisasi benda cagar budaya
		Belum optimalnya upaya menjadikan cagar budaya sebagai sarana edukasi

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

o) Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Secara umum, kinerja layanan perpustakaan di Kota Singkawang sudah cukup baik.

Namun, layanan tersebut perlu ditingkatkan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusif yakni

perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi memiliki fungsi lain seperti sebagai tempat diskusi, tempat pelatihan, mini studi dan sebagainya, sehingga semakin memperluas sarana proses belajar masyarakat. Dalam mewujudkan perpustakaan inklusif diperlukan berbagai upaya diantaranya pembangunan sarana prasarana, perluasan layanan, peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sebagainya. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Perpustakaan di Kota Singkawang.

Tabel 1.31
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan Literasi	Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan yang inklusif	Perluasan fungsi perpustakaan tidak hanya untuk membaca tetapi ada ruang diskusi, mini studio, tempat pelatihan dan sebagainya
		Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

p) Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kinerja layanan kerasipan dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Secara umum, kedua

indikator tersebut masih belum menunjukan kondisi yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sarana prasana kearsipan pada level daerah dan satuan kerja masih terbatas, serta SDM pengelola arsip masih kurang. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kearsipan di Kota Singkawang.

Tabel 1.32
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sistem kearsipan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah	Terbatasnya ketersediaan depot arsip daerah
		Belum semua dan Perpustakaan memiliki depot arsip yang baik
		Belum ada berita acara dalam penghapusan arsip sehingga banyak arsip menumpuk (belum ada SOP)
		Belum optimalnya sistem perawatan dan pemeliharaan arsip
		Masih kurangnya tenaga arsiparis

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a) Perikanan dan Kelautan

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor peternakan dan perikanan. Susu dan ikan lele merupakan beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa sektor peternakan dan perikanan bisa menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang peternakan dan perikanan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil ternak dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

Tabel 1.33
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
Belum optimalnya pemasaran perikanan di dalam daerah	Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Kesadaran masyarakat tentang gizi/protein hewani belum optimal
		belum optimalnya pengelolaan harga ikan lokal
Belum optimalnya tingkat produksi perikanan dan daya saing produk ikan	Kurangnya ketersediaan bibit ikan	Kapasitas produksi BBI belum optimal
		Kapasitas produksi dari UPR belum optimal
	Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan	Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik
		Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan
	Skala Usaha Pembudidaya Ikan	Pembudidaya ikan di Singkawang didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
		Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas
	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil
		Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi
	Akses pemasaran terbatas	Daya saing produk olahan ikan masih relatif rendah
		Belum optimalnya pemanfaatan system penjualan online
	Teknologi dan sistem produksi	Akses terhadap teknologi Terbatas
		Umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif.
		Infrastruktur pendukung masih terbatas
	Adanya penurunan kualitas sumber daya perairan umum	Ikan lebih mudah terkena Penyakit
		Kematian ikan mendadak dalam jumlah besar akibat perubahan musim
		Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

b) Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kota Singkawang.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.34
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	Belum optimalnya Pembinaan perindustrian	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian
		Masih adanya industri kecil yang belum terdata
		Kompetensi IKM yang masih perlu ditingkatkan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

c) Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kota Singkawang terutama di wilayah utara Kalimantan Barat. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM.

Tabel 1.35
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya potensi kepariwisataan Singkawang	Belum optimalnya pengembangan atraksi, amenitas, akomodasi	Paket wisata belum terdiversifikasi
		Destinasi wisata yang belum tersebar
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pariwisata	Belum banyaknya akomodasi pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan
		Belum optimalnya upaya menarik wisatawan lokal
	Belum optimalnya pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata	Belum optimalnya kompetensi SDM masyarakat

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

d) Pertanian

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Beberapa keunggulan sektor pertanian dan peternakan adalah pada komoditas ayam potong dan telur. Sektor pertanian di Kota Singkawang merupakan penyumbang PDRB terbesar keempat setelah sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi dengan capaian rata-rata 12-13%.

Optimalisasi serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang pertanian dan peternakan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil pertanian dan peternakan dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

Tabel 1.36
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kesejahteraan petani	Belum optimalnya kualitas hasil pertanian	Belum optimalnya kapasitas SDM petani
		Belum optimalnya peran kelembagaan petani
		Semakin menurunnya jumlah petani
		Ketersedian sarana prasarana pertanian yang masih kurang
	Belum optimalnya produktivitas lahan pertanian	Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah
		Belum optimalnya ketersediaan sumber daya air pertanian
		Belum optimalnya penggunaan pupuk berimbang
		Belum optimalnya kepatuhan penerapan pola tanam petani
	Belum optimalnya pemasaran dan diversifikasi produk pertanian	Perlunya peningkatan minat petani dalam mengolah produk hasil pertanian
		Belum optimalnya fasilitasi akses pasar
Belum optimalnya produksi, produktivitas ternak, dan daya saing produk hasil ternak	Keterbatasan ketersediaan bibit ternak unggul	Tingkat pengetahuan peternak dalam usaha perbibitan dan manajemen reproduksi ternak masih kurang
		Modal usaha perbibitan ternak yang besar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum berkembangnya kawasan peternakan berupa kluster perbibitan ternak
		Keterbatasan jumlah sarana prasarana Inseminasi Buatan
	Keterbatasan ketersedian pakan ternak	Keterbatasan lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan tanaman pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pakan
	Tingkat pengetahuan dan SDM Peternak belum optimal	Tingkat pendidikan yang rendah dan sebagian pelaku usaha peternakan dalam katageri usia non produktif
		Kurangnya minat generasi muda dalam usaha peternakan
	Skala usaha peternakan belum optimal	Belum optimalnya pendataan kelompok peternak
		Keterbatasan akses modal
		Belum berkembangnya kelembagaan korporasi peternak
		Belum optimalnya peran kelembagaan asosiasi peternak
		Belum optimalnya kemitraan usaha peternakan
	Tingginya risiko kerugian usaha akibat kematian	Kota Singkawang merupakan daerah endemik penyakit hewan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	ternak	menular strategis (PHMS)
		Kurangnya pengetahuan peternak dalam penerapan cara budidaya ternak yang baik
		Kurangnya tingkat kesadaran peternak dalam program asuransi ternak
	Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan pemanfaatan alat mesin peternakan	Keterbatasan ketersediaan air untuk budidaya ternak
		Belum optimalnya pemanfaatan alat mesin peternakan
		Keterbatasan akses pemasaran produk hasil ternak

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

e) Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan perbaikan layanan urusan perdagangan. Selama 2018-2023, kinerja urusan perdagangan cukup baik pada pengelolaan retribusi pasar daerah serta perbaikan sarana prasarana perdagangan (pasar, toko, kios, fasilitas pasar). Namun, untuk masalah ekspor

barang dan pembinaan usaha perdagangan masih perlu dioptimalkan.

Tabel 1.37
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kontribusi perdagangan terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya pembinaan usaha perdagangan	Belum optimalnya pendataan potensi perdagangan
		Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perdagangan
		Perlu peningkatan kapasitas SDM perdagangan
		Fasilitasi izin usaha perdagangan belum optimal
		Masih perlunya peningkatan upaya promosi usaha Perdagangan
	Belum optimalnya pengelolaan UPT	Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
		Belum optimalnya peningkatan retribusi pasar

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

a) Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kota Singkawang. Capaian fungsi perencanaan belum optimal untuk mendukung SAKIP yang masih berpredikat “B” hingga Tahun 2023. Orientasi pembangunan berbasis kinerja outcome/impact perlu ditingkatkan, serta belum terbangunnya manajemen kinerja yang baik berupa pembagian indikator kinerja yang saling mendukung dan terkait antara Wali Kota dengan kepala Perangkat Daerah dan struktur di bawahnya. Beberapa kinerja perencanaan masih berorientasi output berupa ketersediaan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan sebagai berikut:

Tabel 1.38
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik
		Belum terintegrasinya SIPD dengan evaluasi dan penatausahaan keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja outcome
	Belum optimalnya impelementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD)
		Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan Sektoral

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

b) Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukan bahwa sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2023 PAD Kota Singkawang meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,83% per tahun, dimana penerimaan retribusi juga telah mengalami peningkatan dengan rata-rata 6,19% per tahun.

Unsur penunjang pemerintahan keuangan juga memiliki isu atau permasalahan urgen berupa upaya mempertahankan capaian akuntabilitas keuangan yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 1.39
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pendapatan Daerah	Masih adanya potensi pendapatan yang tidak terealisasi	Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak
		Masih adanya objek pajak yang belum membayar pajak sesuai ketentuan
		Menurunnya pendapatan dari komponen retribusi
		Belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi pelanggar pajak
	Masih adanya potensi penurunan pendapatan	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan objek retribusi

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

c) Kepegawaian

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Di Kota Singkawang, masalah pokok dari urusan kepegawaian, yaitu belum optimalnya kualitas kepegawaian yang disebabkan oleh manajemen kepegawaian yang belum maksimal. Beberapa persoalan mikro yang teridentifikasi antara lain tidak meratanya distribusi pegawai antara Perangkat Daerah, kurangnya SDM

di beberapa posisi, serta proses mutasi yang seringkali tidak berjalan lancar.

Tabel 1.40
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas kepegawaian	Manajemen kepegawaian belum optimal	Tidak meratanya distribusi pegawai antar Perangkat Daerah
		Kurangnya SDM di beberapa posisi

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

d) Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya manajemen ASN, juga terkait belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih terpusat, serta skala prioritas pelaksanaan diklat yang berubah. Pemetaan masalah terkait pendidikan dan pelatihan di Kota Singkawang sebagai berikut:

Tabel 1.41
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kompetensi ASN	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	Belum optimalnya fasilitas diklat yang dimiliki BKPSDM
		Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Diklat

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

e) Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi- bagi/terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah.

Tabel 1.42
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Belum dijadikannya hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti
		Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah
		Belum optimalnya koordinasi kelitbangan
	Belumoptimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi masyarakat

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

f) Pengawasan

Capaian fungsi pengawasan di Kota Singkawang telah memenuhi target nasional, yakni Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang berada di Level III Capaian tersebut diperkuat dengan peningkatan integritas aparatur yang ditandai dengan transparansi kegiatan dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan fungsi pengawasan di masa depan, yaitu:

Tabel 1.43
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Indeks Integritas masih rendah	Belum ada OPD yang meraih predikat WBK/WBBM	Belum intensif memberikan bimbingan pembangunan Zona Integritas
Sebagian besar perangkat daerah belum melakukan manajemen risiko	Masih rendahnya budaya sadar risiko	Belum optimalnya internalisasi budaya sadar risiko
Rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya ditindaklanjuti	Komitmen Pimpinan PD dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan masih rendah	Pergantian Pejabat pengampu rekomendasi hasil pengawasan
Indeks RB masih belum optimal	Pelaksaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen	1. Komitmen Pimpinan OPD dalam pelaksanaan RB masih rendah 2. Penguatan dan Penajaman program RB pada level PD belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Belum adanya reward dan punishment terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di OPD

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

g) Sekretariat DPRD

DPRD merupakan mitra Wali Kota yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kota Singkawang cukup baik yakni sudah mencapai target yang ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kota Singkawang.

Tabel 1.44
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Fasilitasi dan tugas	Belum optimalnya	Manajemen pembagian tugas yang kurang efektif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
anggota DPRD	koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota DPRD	Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur serta kemampuan personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
		Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas anggota dewan berbasis kebutuhan daerah

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

h) Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan Wali Kota. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan penerapan SAKIP. Adapun koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah menghasilkan nilai IKM yang meningkat setiap tahun. Tantangan yang masih dihadapi fungsi Sekretariat Daerah, yaitu:

Tabel 1.45
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih kurang optimalnya rumusan dan implementasi kebijakan perekonomian	Belum terlaksananya program revitalisasi pasar	kebutuhan regulasi yang optimal dalam pengelolaan pasar
		kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
dan pembangunan daerah		pembangunan
Belum optimalnya administrasi tata pemerintahan, kebijakan kesejahteraan rakyat dan pengkoordinasian serta fasilitasi kebijakan daerah	Belum optimalnya rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya Kebijakan Bansos yang sesuai dengan kebutuhan
	Belum optimalnya produk hukum dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan daerah	Kurangnya penegakan hukum dalam implementasi produk hukum daerah
Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur	Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat	pengendalian dan pengukuran keberhasilan kebijakan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

i) Kewilayahan

Fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan, salah satunya dalam rangka menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 1.46
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas Pelayanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	publik	
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

j) Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kota Singkawang memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

Tabel 1.47
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum dan Kesatuan Bangsa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya potensi konflik	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas wilayah	Minimnya SDM untuk deteksi dan kewaspadaan dini
		Belum optimalnya pendataan dan peran Ormas
		Pengembangan nilai-nilai kebangsaaan dan multikulturalisme yang belum efektif

Sumber Data : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026

5. Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

a) Isu Sustainable Development Goals (SDG's)

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

1) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
2) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
3) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
4) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
5) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusi. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

b) Isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1) **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2) **Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.**
3) **Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.**
4) **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur

dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5) **Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi** keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5 (lima) Arahan Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis:

Tabel 1.48
Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
1	**Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:** Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterak an secara adil dan merata	• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumberdaya air, sumber daya energi, serta kehutanan • Akselerasi peningkatan nilai tambah pertaniandan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunanmakin berkuran. • Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani- nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA • Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter • Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga,namun tertinggal dalam infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
2.	**Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:** Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunandan pemanfaatan ruang.	• Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulandaerah • Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah • Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata • Peningkatan dayadukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Tingginya angka kemiskinan diwilayah timur Indonesia (18%) • Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio giniperdesaan 0,317 dan perkotaan 0,392 • Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia, terutama Pulau Jawa • Terbatasnya sarana prasarana,aksesibilitas, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasanperbatasan
3.	**Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing:** Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju	• Pengendalian penduduk dan penguatan tatakelola kependudukan • Penguatan pelaksanaan perlindungansosial	• Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan bonus demografi, jika tidak dikelolabaik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial,serta tekanan pada pangan dan lingkungan

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	pembangunanyang inklusif dan merata diseluruh wilayah	• Peningkatan pelayanan kesehatan menujucakupan kesehatan semesta • Peningkatanpemerataan layanan pendidikan berkualitas • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dandaya saing	• Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin saat terjadi guncanganmasih cukup tinggi • Derajat kesehatan dan tingkatpendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk • Perlindungan dan pemenuhanhak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaanPUG belum efektif, serta perandan partisipasi pemuda dalampembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko • Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehinggalaju penurunan kemiskinan cenderung melambat • Produktvitas dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDMIndonesia 65 dari 130 negara
4	**Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:** Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan	• Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila	• Melemahnya ideologi pancasiladan ketahanan budaya bangsa • Belum optimalnya pemajuankebudayaan Indonesia

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunanuntuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	• Pemajuan danpelestarian kebudayaan • Moderasi beragama • Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas	• Belum mantapnya pendidikankarakter dan budi pekerti • Masih lemahnya pemahamandan pengamalan nilai-nilai ajaran agama • Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuattoleransi dan kerukunan • Belum optimalnya perankeluarga • Rendahnya budaya literasi,inovasi, dan kreativitas
5	**Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:** bertujuan mendukung Aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunannasional	• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar • Pembangunan konektivitas multimoda untukmendukung pertumbuhan ekonomi • Pembangunan infrastruktur perkotaan • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur	• Keterbatasan akses perumahan dan permukimanyang layak, aman, dan terjangkau • Belum optimalnya peningkatan akses air minumlayak dan aman • Belum optimalnya peningkatan akses layanansanitasi layak dan aman • Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kunatitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
		TIK untuk transformasi digital	• Keselamatan dan keamanantransportasi yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka kematian akibat kecelakaan • Ketahanan kebencanaan infrastruktur • Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah karena terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya • Infrastruktur ekonomi yangmenhadapi tantangan padaaspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan Darat • Infrastruktur perkotaan yang masih menghadapi tantangan:transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, terjangkau di perkotaan. Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tangtangankeberlanjutan

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			penyediaan, akses dan keterjangkauan, serta kecukupan penyediaan • Transformasi digital memiliki tantangan penuntasan dan pemanfaatan infrastrktur TIK,serta fasilitas pendukung transformasi digital
6	**Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana danperubahan iklim:** Pembangunannasional perlumemperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim • Pembangunan rendah karbon	• Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absout menurun,dan tutupan lahan mengalami perbaikan • Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi • Penurunan emisi gas rumahkaca yang mendekati target
7	**Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:** Negara wajibhadir	• Reformasi kelembagaan birokrasi untukpelayanan berkualitas • Penataan kapasitas lembagademokrasi,	• Dinamika geoplitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional,instabilitas kawasan Timur Tengah, dinamika kebijakan luar negeri

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	penguatan kesetaraan dan kebebasan Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasidan tata kelola keamanan siber • Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNIdi luar negeri • Peningkatan rasaaman, penguatankemampuan pertahanan dan industri pertahanan	negara adi daya, melemahnya tata kelola globaldan menguatnya uniteralisme • Tantangan nasional berupa demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatannegara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan Trans nasional

c) Isu-isu Strategis RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari isu strategis pada lingkup internal dan isu strategis pada lingkup global. Adapun isu-isu strategis pada lingkup internal Pemerintah Kalimantan Barat, adalah :

a. Kekuatan Daerah

1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas yang memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;

b. Kelemahan Daerah

1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
2) Lemahnya daya saingKalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat.

Sedangkan identifikasi Isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Pemerintah Kalimantan Barat, antara lain :

a. Peluang daerah

1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang sebagai berikut :
    a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
    b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
    c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk–Biawak, PLBN Badau- Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang-Serikin
3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
4) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan

budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;

5) Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:
   (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
   (b) penyediaan infrastruktur wilayah,
   (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Ancaman Daerah

1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
   Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;
   a) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
   b) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
2) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan

Barat, sehingga masih terjadi Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing di wilayah perairan Kalimantan Barat;

3) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
4) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

d) Penetapan Isu Strategis Kota Singkawang

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter dengan permasalahnnya yaitu Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan indikator masih adanya Masih adanya balita dengan status gizi buruk dan stunting, Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000, masih adanya temuan penyakit menular (TBC,Covid 19 dll) serta Masih adanya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Diare, polio dll).

   Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan pencapaian pembangunan urusan kesehatan yaitu:

   - Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka

kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita.

- Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).

Adapun dari dimensi pendidikan, permasalah yang dapat ditemukan adalah menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SD/MI/Paket A.

Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan untuk pencapaian urusan pendidikan yaitu:

- Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah).
- Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar.
- Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0%; IPM = 80,0).

2) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan.

   Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 hingga mencapai -2,43 dari 4,53 pada Tahun 2019 yang salah satu faktor terbesarnya adalah terjadinya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada menurunnya perekonomian hampir disemua sector khususnya sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

   Berdasarkan RPJPD Kota Singkawang, sampai akhir Tahun 2025 perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh sebesar 6,29% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28% per tahun. Adapun prioritas Pembangunan ekonomi pada tahap akhir diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

   - Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas.
   - Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar.
   - Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional.
   - Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.

3) Peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan

Sesuai RPJPD Kota Singkawang pada Tahap ke-4, pembangunan infrastruktur ditargetkan dapat mencapai pembangunan berbagai bidang sebagai berikut:

- Bidang Transportasi:
  pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang ± 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang ± 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan ± 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang.

- Bidang Sumber Daya Air:
  Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'.
- Bidang Informasi dan Telekomunikasi :
  semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi.
- Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih.
- Bidang Energi Listrik :
  kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.

4) Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mencapai target akhir RPJPD Kota Singkawang khususnya Tahap ke-4 yaitu untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:

- Terwujudnya prototipe sebuah civil society yang kuat di Kota Singkawang;
- Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip good governance.

6) Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel

Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

7) Lemahnya penegakkan implementasi produk hukum

dapat dilihat dari masih tingginya angka kriminalitas sehingga Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Kondusif, Toleran Dan Berbudaya belum optimal.

Tabel 1.49
Rumusan Isu Strategis RPD

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6
TPB Pilar Pembangunan Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan.	Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.	Terkendalinya tingkat pertumbuhan penduduk.	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;
				meningkatnya pemerataan kesehatan serta peningkatan kualitas dan cakupan program layanan kesehatan.	
				meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan	Belum optimalnya derajat

				masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.	Kesehatan masyarakat; (masih tingginya kasus stunting)
				tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang semakin membaik serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan	Belum optimalnya kualitas Pendidikan (masih minimnya penyelenggaraan Pendidikan inklusif)
				peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM	
				meningkatnya pemerataan pendidikan dalam kerangka penuntasan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas lulusan	
TPB Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi	Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari	Terwujudnya perekonomian yang maju dengan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meluasnya kegiatan	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada

Pembangunan Ekonomi	kesenjangan dan menjamin pemerataan	penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian.	mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.	investasi di berbagai sektor ekonomi strategis.	Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan
				Meningkatnya kegiatan dan peran usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi dalam berbagai kegiatan perdagangan dan jasa dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian sektor industri, UMKM, perdagangan pariwisata, ekonomi kreatif dan pertanian untuk memperluas lapangan kerja
				Meningkatnya kemampuan pengelolaan pariwisata yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.	
		Peranan perindustrian, perdagangan		Meningkatnya kemampuan perpajakan daerah (local taxing	

		dan pariwisata terhadap perekonomian belum optimal.		power) dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.	dan pengentasa kemiskinan
				Meningkatnya kegiatan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) berbasis pada hasil produk agribisnis lokal, dan pengembangan klaster (IKM).	
				Dihasilkannya komoditas unggulan yang memiliki aksesibilitas pasar yang kuat dan berdaya saing, serta mampu mendorong kegiatan industri pengolahan dan perdagangan.	
TPB Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses	Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna	Meningkatkan sistem manajemen dan prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap sebagai faktor	- Belum optimalnya sistem manajemen dan

Pembangunan Ekonomi	ekonomi dan pelayanan dasar	infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.	tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.	pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketertiban dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.	prasaranan transportasi
				Merealisasikan rencana pembangunan bandar udara sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat dan investor untuk transportasi ke dalam dan luar propinsi maupun kemancanegara dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat bisnis, industri jasa,	• Belum selesainya proses pembangunan Bandar udara Singkawang • Belum adanya terminal tipe A sebagai sarana pendukung transportasi antar negara

				pariwisata dan agropolitan.	• Belum terjaganya kualitas air baku • Belum terpenuhinya pemenuhan air bersih pada masyarakat kota Singkawang
				Mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan status terminal, yaitu terminal dalam kota, terminal antar kota dan terminal antar negara.	•

	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim			Menjaga dan meningkatkan kualitas air serta pengembangan sistem distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan dengan pengelolaan secara efektif, efesien dan bekelanjutan	•
				Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan kecenderungannya terus menurun dan ketersediaan SDA semakin menipis.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup

TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan danpengalokasian anggaran.	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik.	• Belum optimalnya Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel • Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
				Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan membangun sinergisitas antar lembaga dan antar daerah.	
		Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan ekosistem.	Menegakan supremasi hukum dan kepastian hukum masyarakat serta peraturan daerah.	

		penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.			
		Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehinggam berdampak terhadap penurunan daya saing daerah.		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.	• Belum optimalnya Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu • Belum optimalnya Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
				Menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah, kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.	

				Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.	Belum optimalnya pengawasan internal berbasi resiko
			Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.	Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran penyidik PNS dalam penegakan Perda.	Lemahnya Penegakkan Implementasi Produk hukum
				Mengembangkan budaya hukum di masyarakat.	Belum maksimalnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik
				Melakukan proses legal drafting untuk menginventarisir, merancang, menetapkan, dan mengimpelementasikan Perda serta mengevaluasi Perda-Perda yang sudah tidak relevan.	

				Meningkatkan sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Kota Singkawang.	
				Membangun struktur dan kultur politik masyarakat Kota Singkawang yang demokratis.	
				Meningkatkan peran dan fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik, infrastruktur politik dan antara komponen masyarakat yang ada di Kota Singkawang.	
				Meningkatkan semangat nasionalisme, wawasan	

				kebangsaan, dan kesadaran bela negara.	
				Meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Singkawang tentang multikultarilisme budaya dan politik, sehingga terimplementasikannya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan etika politik.	
				Mengembangkan iklim dan proses politik yang demokratis di Kota Singkawang sehingga memungkinkan semua elemen masyarakaSut bisa berpartisipasi dan melakukan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan	

				pemerintahan dan pembangunan.	
				Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang bertumpu pada ke-bhineka Tunggal ika-an.	
				Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi.	
				Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia	

				anggota partai politik dan anggota DPRD.	
				Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi HAM.	
				Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, serta zat adiktif.	
				Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.	

Sumber Data : RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026

b. Arah Pembangunan

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RPD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005- 2025, dengan visi **"Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri"**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan asil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta

mengembangkan kepariwisataan.

8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 Kota Singkawang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada beberapa bidang strategis yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari perubahan ini adalah pada peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan program prioritas Pemerintah Kota Singkawang, yaitu :

Tabel 1.50
Program Prioritas Pemerintah Kota Singkawang

No	Prioritas Daerah	Uraian
1.	Perokonomian Daerah	▪ Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas. ▪ Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar. ▪ Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional. ▪ Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.
2.	Pembangunan Pendidikan	▪ Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. ▪ Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah).

No	Prioritas Daerah	Uraian
		▪ Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar. ▪ Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. ▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0% ; IPM = 80,0).
3.	Pembangunan Kesehatan	▪ Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita. ▪ Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan. ▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh ; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).
4.	Pembangunan Fertilitas dan Keluarga Berencana	▪ Pemantapan dan pengembangan Program KIE dalam menunjang Kesehatan Reproduksi dan partisipasi Pria ber KB (jumlah peserta KB Aktif meningkat menjadi 95,0%). ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas Kader KB dalam rangka mendorong terwujudnya keluarga berkualitas tinggi.

No	Prioritas Daerah	Uraian
5.	Pembangunan Ketenagakerjaan	▪ Penurunan angka pengganggguran terbuka menjadi 1,8% melalui pembangunan berorientasi padat karya. ▪ Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan.
6.	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya sehingga jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 9,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) berkurang menjadi 7,7%.
7.	Sarana dan Prasarana	▪ Bidang Transportasi ; pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang ± 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang ± 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan ± 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang. ▪ Bidang Sumber Daya Air: Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'. ▪ Bidang Informasi dan Telekomunikasi : semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi.

No	Prioritas Daerah	Uraian
		▪ Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih. ▪ Bidang Energi Listrik : kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.
8.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
9.	Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	▪ Menjadikan Kota Singkawang sebagai kota jasa dan tujuan wisata utama yang paling aman dan tertib di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya. ▪ Mengimplementasikan Perda dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi Perda-Perda yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan politik dan hukum yang ada.
10.	Politik dan Pemerintahan	▪ Terwujudnya prototipe sebuah *civil society* yang kuat di Kota Singkawang. ▪ Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip *good governance*.
11.	Wilayah dan Tata Ruang	▪ Evaluasi dan revisi tata ruang di semua wilayah disesuaikan perkembangan dan kebutuhan tata ruang kota. ▪ Berkembang pesatnya kawasan baru dan tumbuhnya pusat-pusat industri sebagai fasilitas vital perdagangan

No	Prioritas Daerah	Uraian
		regional sesuai dengan RTRK Kota Singkawang.
12.	Budaya dan Agama	▪ Terbangunnya secara signifikan tingkat kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kearifan lokal menjadi identitas sosial dan budaya, dan terwujudnya *civil society*.

Sumber : RPDP Kota Singkawang Tahun 2023-2026

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan Kota Singkawang untuk periode tahun 2023-2026 difokuskan pada pemajuan daerah yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan perekonomian lokal. Program ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Singkawang sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Uraian program pembangunan Kota Singkawang tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.51
Program Pembangunan Daerah

NO	Program Pembangunan Daerah (RPDP 2023 - 2026)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	Program Pengelolaan Pendidikan
6	Program Pengembangan Kurikulum

7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
8	Program Pengembangan Kebudayaan
9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
10	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
13	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
14	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
15	Program Perlindungan Perempuan
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
17	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
18	Program Perlindungan Khusus Anak
19	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
20	Program Pengendalian Penduduk
21	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
22	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
23	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
24	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
25	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
27	Program Pengembangan UMKM
28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
29	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
30	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
31	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

32	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
33	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
34	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
38	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
39	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
40	Program Penyuluhan Pertanian
41	Program Perizinan Usaha Pertanian
42	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
43	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
44	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
45	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
46	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
47	Program Penanganan Kerawanan Pangan
48	Program Pengawasan Keamanan Pangan
49	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
50	Program Pemasaran Pariwisata
51	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
52	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
54	Program Promosi Penanaman Modal

55	Program Pelayanan Penanaman Modal
56	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
57	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
58	Program Penempatan Tenaga Kerja
59	Program Hubungan Industrial
60	Program Perencanaan Tenaga Kerja
61	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
62	Program Pemberdayaan Sosial
63	Program Rehabilitasi Sosial
64	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
65	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
66	Program Penanganan Bencana
67	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
68	Program Pengembangan Perumahan
69	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
70	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
71	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
72	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
73	Program Kawasan Permukiman
74	Program Penyelenggaraan Jalan
75	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
76	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
77	Program Pengembangan Permukiman
78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

79	Program Penataan Bangunan Gedung
80	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
81	Program Pengelolaan Penerbangan
82	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
83	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
84	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
85	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
86	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
87	Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
88	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
89	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
90	Program Pengelolaan Persampahan
91	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
92	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
93	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
94	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
95	Program Penetapan Tanah Ulayat
96	Program Program Pengelolaan Tanah Kosong
97	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
98	Program Penatagunaan Tanah
99	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
100	Program Perekonomian Dan Pembangunan

101	Program Pendaftaran Penduduk
102	Program Pencatatan Sipil
103	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
104	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
105	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
106	Program Pembinaan Perpustakaan
107	Program Pengelolaan Arsip
108	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
109	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
111	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
113	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
114	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
115	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
116	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
117	Program Kepegawaian Daerah
118	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
119	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
120	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
121	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
122	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
123	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
124	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
125	Program Penyelenggaraan Pengawasan

126	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
127	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
128	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
129	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
130	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
131	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
132	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
133	Program Penanggulangan Bencana
134	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber :RPDP Kota Singkawang Tahun 2023-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan;
8) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
9) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
10) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
12) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
13) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan.

B. Kesehatan

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
10) Peningkatan Pelayanan BLUD;
11) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota;

12) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
13) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
14) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dam Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota;
15) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
16) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Komptensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota;
17) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
18) Penerbitan Sertifikat Produkdi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
19) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
20) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
21) Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
22) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
23) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Sau) Daerah kabupaten/Kota;
10) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di BAwah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
11) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
12) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota;
13) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
14) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;
15) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;

16) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
17) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
18) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
19) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil kontruksi;
20) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
21) Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
22) Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
23) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
24) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

D. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Tumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota;

8) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
9) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
10) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Sepuluh) Ha;
11) Pencagahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah kabupaten/Kota;
12) Penyelenggaraan PSU Perumahan;

E. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Penataan Organisasi;
9) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10) Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;
12) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

13) Peralatan Proteksi Kebakaran;
14) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
15) Pelayanan Infromasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
16) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
17) Pelayanan Penyelamayan dan Evakuasi Korban Bencana;
18) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
19) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

F. Sosial

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peranglat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9) Pengumpulan Sumbangan dalam Saerah Kabupaten/Kota;
10) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
11) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
12) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

13) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
14) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
15) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
16) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
17) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
18) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawab Basional Kabupaten/Kota.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
2) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
3) Pengukuruan Produktivitas Tingkat Daerah;
4) Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota;
5) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
6) Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota;
7) Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
8) Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota;
9) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

B. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1) Pelembagaan Pengurustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
5) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
6) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Peempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
7) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota'
8) Perlembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
9) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
10) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
11) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
12) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindunga Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Pangan

1) Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan;
3) Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
4) Pelaksabaab Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi;
5) Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
6) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
7) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

D. Pertanahan

1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3) Penetapan TanahUlayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4) Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
5) Inventarisasikan dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
6) Penerbitan Izin Membuka Tanah;
7) Penerbitan Izin Membuka Tanah;
8) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

E. Lingkungan Hidup

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasu Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
11) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
13) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
14) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
15) Penyimpanan Sementara Limbah B3;
16) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
18) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota;

19) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
20) Pengelolaan Sampah;
21) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
22) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

F. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1) Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2) Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Eduaksi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
3) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

G. Kependudukan Dan Catatan Sipil

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

9) Penataan Pendafatraan Penduduk;
10) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
11) Pelayanan Pencatatan Sipil;
12) Penyelenggaraan Pencataan Sipil;
13) Pengumpulan Data Kependuudkan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
14) Penyelenggaraan Pengelolaan Inforamsi Administrasi Kependudukan;
15) Penyusunan Profil Kependudukan.

H. Perhubungan

1) Perencaaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daearah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Penyediaan Jada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
9) Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota;
10) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
11) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parker;
12) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13) Pelaksaaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
14) Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;

15) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota;
16) Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan;
17) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
18) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Kota) Daerah Kabupateb/Kota;
19) Penetapan Tariff Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan Dan Perdessaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
20) Penetapan Lintas Penyebrangan Dan Perstujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
21) Pembangun, Penerbitan Izin Pembangunan Dna Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
22) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter.

I. Komunikasi Dan Informatika

1) Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keungan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10) Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11) Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oelh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12) Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13) Penyelenggaraan Statistic Sektoran Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
14) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintad Adaerah Kabupaten/Kota.

J. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Penngadaan Barang ,Ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

9) Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
10) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi Yang Wilayang Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
11) Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayang Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
12) Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
13) Pengmebangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

K. Penanaman Modal

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8) Pemeluharaab Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
10) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;

11) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenang Daerah Kabupaten/Kota;
12) Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13) Pengendalia Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
14) Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

L. Kepemudaan Dan Olahraga

1) Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader;
2) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
4) Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
5) Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

M. Kebudayaan

1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;

5) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
6) Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
7) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

N. Perpustakaan

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pengelolaan Perpustakaa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
8) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

O. Kearsipan

1) Pengelolaan Arsip Dinams Daerah Kabupaten/Kota;
2) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
3) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun;
4) Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.

3. Urusan Pilihan

A. Kelautan Dan Perikanan

1) Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
4) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
5) Pengawasn Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6) Penerbitan Tanda Daftar Usahas Pengelolaan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil;
7) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industry Pengelolaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

B. Pariwisata

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
9) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;

10) Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
11) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
12) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

C. Pertanian

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrsi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
10) Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
11) Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
12) Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
13) Pengembangan Prasarana Pertanian;
14) Pembangunan Prasarana Pertanian;
15) Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum;

16) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
17) Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
18) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medic Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
19) Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
20) Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
21) Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
22) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
23) Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
24) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

D. Perdagangan

1) Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Di Tempat;
3) Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
4) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya;
5) Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;

6) Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
7) Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan;
8) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

E. Industri

1) Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industry Kabupaten/Kota;
2) Penerbitan Izin Usaha Industry (Iui), Izin Perluasan Usaha Industry (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

1) Perencanaan, Penganggaean, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
10) Penataan Organisasi;

11) Penyususnan Perencanaan Dan Pendanaan;
12) Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13) Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan;
14) Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah;
16) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
17) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam);
18) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan.

B. Keuangan

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9) Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
10) Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

11) Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah;
12) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
14) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

C. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9) Penataan Organisasi;
10) Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN;
11) Mutasi Dan Promosi ASN;
12) Pengembangan Kompetensi ASN;
13) Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

D. Pemerintahan Umum

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideolohi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
9) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik;
10) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
11) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
12) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan mutu pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2020 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM adalah salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini, SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di mana penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, Kota Singkawang telah menetapkan haluan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari Tahun Kedua Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2024, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024. KUA-PPAS juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada

masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2024 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, untuk dipedomani seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap urusan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.51
Anggaran SPM Urusan Pelayanan Dasar

NO.	JENIS URUSAN PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN
1	Pendidikan	87.175.274.579,00
2	Kesehatan	1.859.686.292.00
3	Pekerjaan Umum	12.842.490.176,00
4	Perumahan Rakyat	123.067.360,00
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.557.668.745,00
6	Sosial	581.155.156,00
TOTAL		105.139.342.308,00

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut capaian kinerja makro Pemerintah Kota Singkawang :

TABEL 2.1

CAPAIN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,13	74,68	0,742
2	Angka Kemiskinan	4,7	4,53	-3,617
3	Angka Pengangguran	8,51	7,92	-6,933
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,06	0
5	Pertumbuhan Per-Kapita	6,47	6,96	7,573
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,274	0,277	1,095

Sumber Data : Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	**Pendidikan**	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dakam PAUD	35,689%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90,013%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,376%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	46,428%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2.	**Kesehatan**	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	5,340%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	80,519%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,345%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87,635%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-

		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	33,622%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,928%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28,181%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	45,442%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12,782%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	59,393%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	78,427%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-

		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	125,858%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	79,312%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
3.	**Pekerjaan Umum**	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	8,799%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	20,804%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	65,397%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air	49,561%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

		minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,116%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	57,096%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	98,654%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4.	**Perumahan Rakyat**	1. Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-

		2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Data tidak dapat ditampilakan karena Dinas Perkimta tidak melaksanakan relokasi program pemerintah kota
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	50,828%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,520%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	8,747%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum Dan**	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Polisi Pamong Praja	-
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Polisi Pamong Praja	-

	Perlindungan Masyarakat	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.250%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,640%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Polisi Pamong Praja	-
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,69%	Polisi Pamong Praja	-
6.	**Sosial**	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	70,097%	Dinas Sosial PPPA	-
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100%	Dinas Sosial PPPA	-

		dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
7.	**Tenaga Kerja**	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	87,179%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	6,235%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	166,933%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	11,781%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
		5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	81,456%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-

8.	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,106%	Dinas Sosial PPPA	-
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	88,524%	Dinas Sosial PPPA	-
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	34,369%	Dinas Sosial PPPA	-
9.	**Pangan**	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	123,266**%**	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
10.	**Pertanahan**	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-

		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya perolehan data Objek dan Subjek Tanah Landereform
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya perolehan data Luasan Tanah Reforma Agraria
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
11.	**Lingkungan Hidup**	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	65,96%	Dinas Lingkungan Hidup	-
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	99,616%	Dinas Lingkungan Hidup	-

		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	39,062%	Dinas Lingkungan Hidup	-
12.	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	1. Perekaman KTP Elektronik	98,655%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	66,075%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		3. Kepemilikan akta kelahiran	91,955%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	68,965%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
13.	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang

14.	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,45%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	58,408%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4,472%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
15.	**Perhubungan**	1. Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	58%	Dinas Perhubungan	-
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,31	Dinas Perhubungan	-
16.	**Komunikasi Dan Informatika**	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	72,972%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-

		Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
17.	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	12,345%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	12,638%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
18.	**Penanaman Modal**	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	5,633%	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja	-
19.	**Kepemudaan Dan Olahraga**	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	79,052%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50,727%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	5%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
20.	**Statistik**	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-

		data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
21.	**Persandian**	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	43,720%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
22.	**Kebudayaan**	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	90,604%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
23.	**Perpustakaan**	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	73,57%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	94,03%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
24.	**Kearsipan**	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	81,73%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-

		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,67%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
25.	**Kelautan Dan Perikanan**	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	101,883%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
26.	**Pariwisata**	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	38,570%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-33,250%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	19,265%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,317%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-

		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,606%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
27.	**Pertanian**	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	434,943 Ton/Ha	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-74,205%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
28.	**Kehutanan**	-	1%	Bagian Pemerintahan	Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Singkawang
29.	**Energi Dan Sumber Daya Mineral**	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0%	Bagian Pemerintahan	Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Singkawang
30.	**Perdagangan**	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-

		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	67,027%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68,960%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
31.	**Perindustrian**	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,392%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	76,78%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data tidak tersedia karena tidak ada data IUI Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data tidak tersedia karena belum ada penerbitan IPUI oleh instansi terkait.
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data tidak tersedia karena belum ada penerbitan IUKI dan IPKI oleh instansi terkait.
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data Industri di Kota Singkawang tidak masuk dalam SIINas, tetapi masuk dalam SIIDa
32.	**Transmigrasi**		1%	Bagian Pemerintahan	Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Singkawang

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

TABEL 2.3

INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	**Perencanaan Dan Keuangan**	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	29,226	Badan Keuangan Daerah	
		2. Rasio PAD	27,466	Badan Keuangan Daerah	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat Kota Singkawang	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat Kota Singkawang	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	80,919	Inspektorat Kota Singkawang	

		6. Opini Laporan Keuangan	7	Inspektorat Kota Singkawang	LKPD TA. 2023 : WTP
2.	**Pengadaan**	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak terdapat proyek konstruksi dengan nilai besar yang dibawa ketahun berikutnya
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	0,796	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	84,877	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	3,385	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3.	**Kepegawaian**	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS	68,355	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	

		tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Sumber Daya Manusia	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,017	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,4852	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.	**Manajemen Keuangan**	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4,6388	Badan Keuangan Daerah	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	26,5620	Badan Keuangan Daerah	
		3. Assets Management	3	Badan Keuangan Daerah	

		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,6429	Badan Keuangan Daerah	
5.	**Transparansi Dan Partisipasi Publik**	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	96,805	Dinas Komunikasi dan Informasi	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	66,666	Dinas Komunikasi dan Informasi	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2024 terhadap target tahun 2024, terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024 dinyatakan “Sangat Baik”, karena rata-rata capaiannya adalah 99,61%. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merekomendasikan untuk melakukan perbaikan dokumen perencanaan. Sebagai proses perbaikan kinerja, Pemerintah Kota Singkawang melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan kinerja berupa penyusunan pohon kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perubahan serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perbaikan dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026 tidak dilakukan mengingat akhir dokumen RPD tersebut akan berakhir dan digantikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan perjanjian kinerja perubahan yang mengacu pada dokumen Pohon Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,94
	Rata-rata Lama Sekolah	8,35

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*
Tercptanya Masyarakat Yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Kota Toleran	6,60
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	9,83
Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6
	Distribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	11,87
Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	6,50%
Menurunya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,50%
Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	68,67
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,21
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks resiko Bencana	120
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	63,20
Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP	3,30
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1,5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*
Meningkatnya Digitaslisasi Layanan Administrasi Pemerintahan	Indeks SPBE	3,34
Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Indeks Profesionalitas ASN	62,72

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2024, Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan 18 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Daerah Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 20 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 8 indikator kinerja atau sebesar 40% memiliki capaian melebihi target, 2 indikator kinerja atau sebesar 10% sesuai target dan 10 indikator kinerja atau sebesar 50% belum mencapai target.

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,1	74,75	102,26%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,94	12,95	100,08%
		Rata-rata Lama Sekolah	8,35	8,22	98,44%
3	Tercptanya Masyarakat Yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Kota Toleran	6,60	6,5	98,48%
4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8	7,92	101,01%
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	9,83	10,61	107,93%
6	Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6	6,74	112,33%
		Distribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	11,87	11,02	86,62%
7	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	6,50	5,63	86,62%
8	Menurunya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,50	4,53	99,34%
9	Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	68,67	64,9	94,51%
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,21	65,96	99,62%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
11	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks resiko Bencana	120	155,47	77,19%
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28	4,46	104,21%
13	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	63,2	62,36	98,67%
14	Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP	3,30	3,261	98,82%
15	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%
16	Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1,5	1,5	100%
17	Meningkatnya Digitaslisasi Layanan Administrasi Pemerintahan	Indeks SPBE	3,34	3,35	100,30%
18	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Indeks Profesionalitas ASN	62,72	74,99	119,56%

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan capaian tahun sebelumnya diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang gambarkan sebagaimana berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,46	72,81	74,75
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,92	12,94	12,95
	Rata-rata Lama Sekolah	8,19	8,21	8,22
Tercptanya Masyarakat Yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Kota Toleran	6,58	6,5	6,5
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,63	8,51	7,92
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	9,77	9,89	10,61
Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,67	6,49	6,74
	Distribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	11,82	11,33	11,02
Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	6,76	79,75	5,63
Menurunya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,67	4,7	4,53
Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	n/a	51,21	64,9

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,71	66,69	65,96
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks resiko Bencana	155,47	155,47	155,47
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,22	4,22	4,46
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	62,88	62,29	62,36
Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP	3,144	3,261	3,261
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,75	0,75	1,5
Meningkatnya Digitaslisasi Layanan Administrasi Pemerintahan	Indeks SPBE	2,6	3,33	3,35
Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Indeks Profesionalitas ASN	59,73	74,99	74,99

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan target Jangka Menengah tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,63	72,82	97,57
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,96	12,95	99,92
	Rata-rata Lama Sekolah	8,51	8,22	96,59
Tercptanya Masyarakat Yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Kota Toleran	6,7	6,5	97,01
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,7	7,92	97,22
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	9,85	10,61	107,72
Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,15	6,74	162,41
	Distribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	11,97	11,02	92,06
Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	8	5,63	70,38
Menurunya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,16	4,53	91,83

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	73,66	64,9	88,11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,41	65,96	99,32
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks resiko Bencana	110	155,47	70,75
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,46	102,53
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	64	62,36	97,44
Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP	3,5	3,261	93,17
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00
Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1,75	1,75	100
Meningkatnya Digitaslisasi Layanan Administrasi Pemerintahan	Indeks SPBE	3,36	3,35	99,70
Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Indeks Profesionalitas ASN	69,14	74,99	108,46

2.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional, Capaian Provinsi dan/atau Capaian Kabupaten/Kota Terdekat (*Benchmark* Kinerja)

Grafik 2.1 benchmark kinerja capaian UHH Tahun 2024

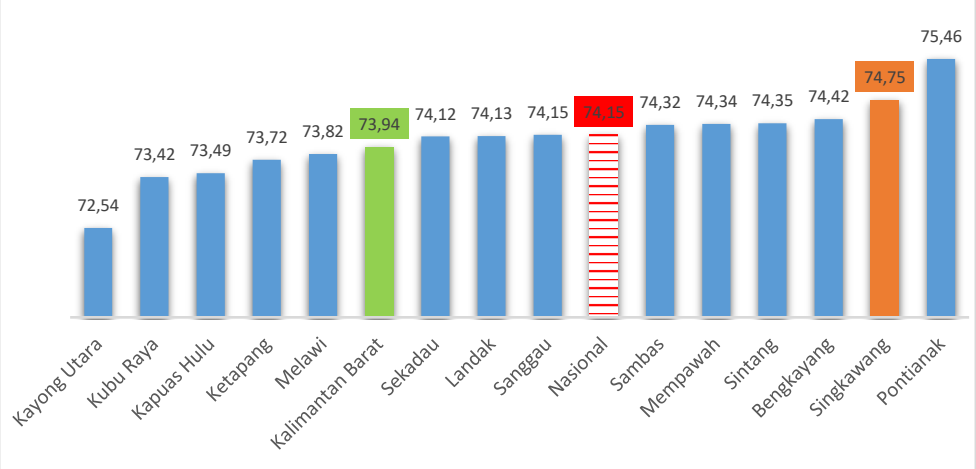

Grafik 2.2 benchmark kinerja capaian Rata^2 Lama Sekolah Tahun 2024

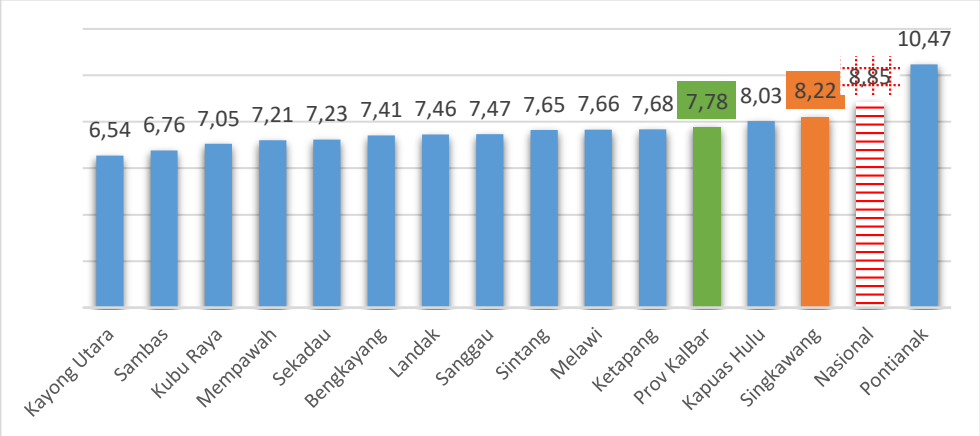

Grafik 2.3 benchmark kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024

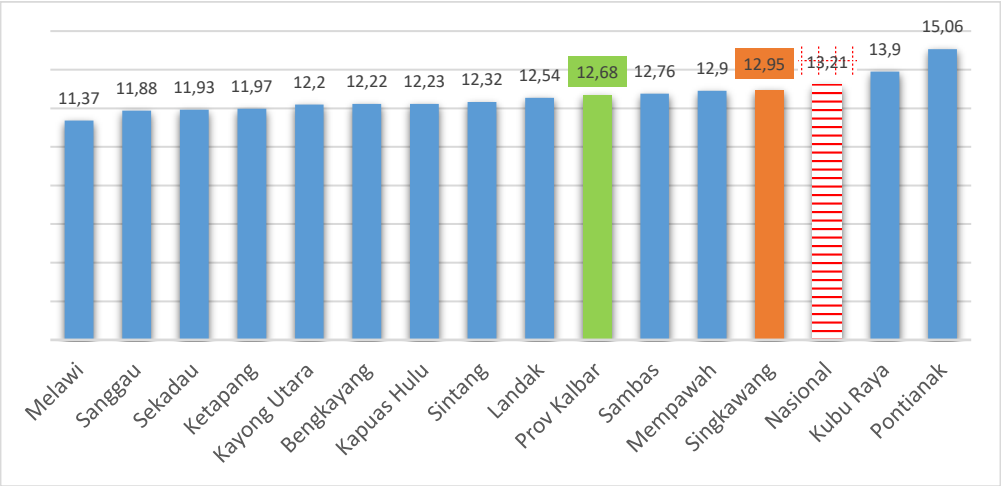

Grafik 2.4 benchmark kinerja Indeks Toleransi Tahun 2023

Sumber : Setara Institute

Grafik 2.5 benchmark kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

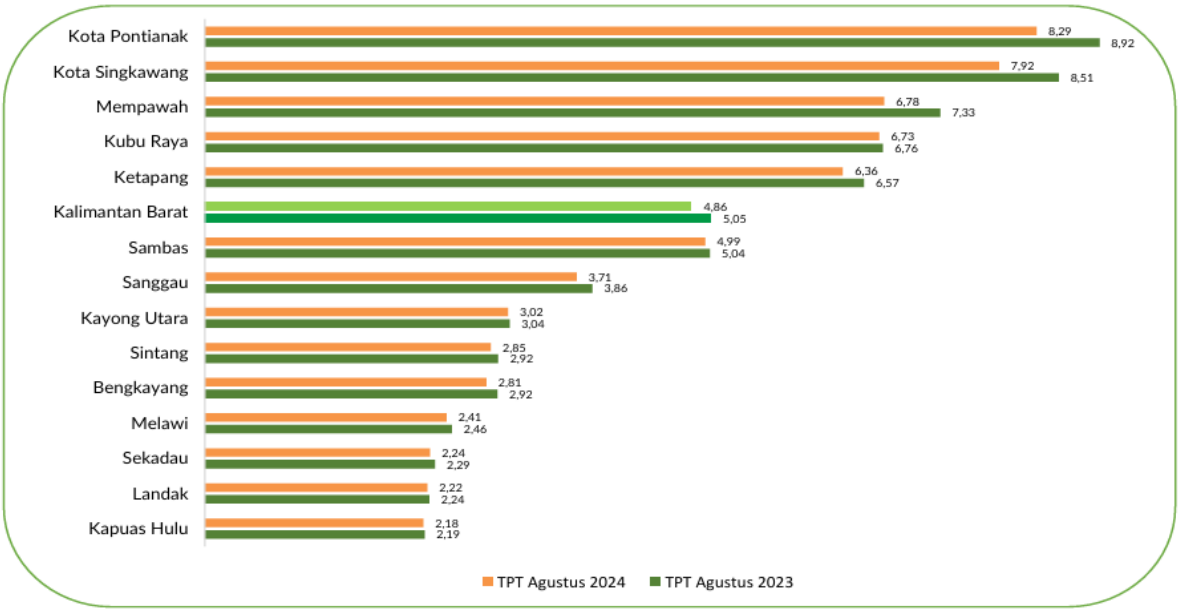

Grafik 2.6 Kinerja PAD Sektor Pariwisata

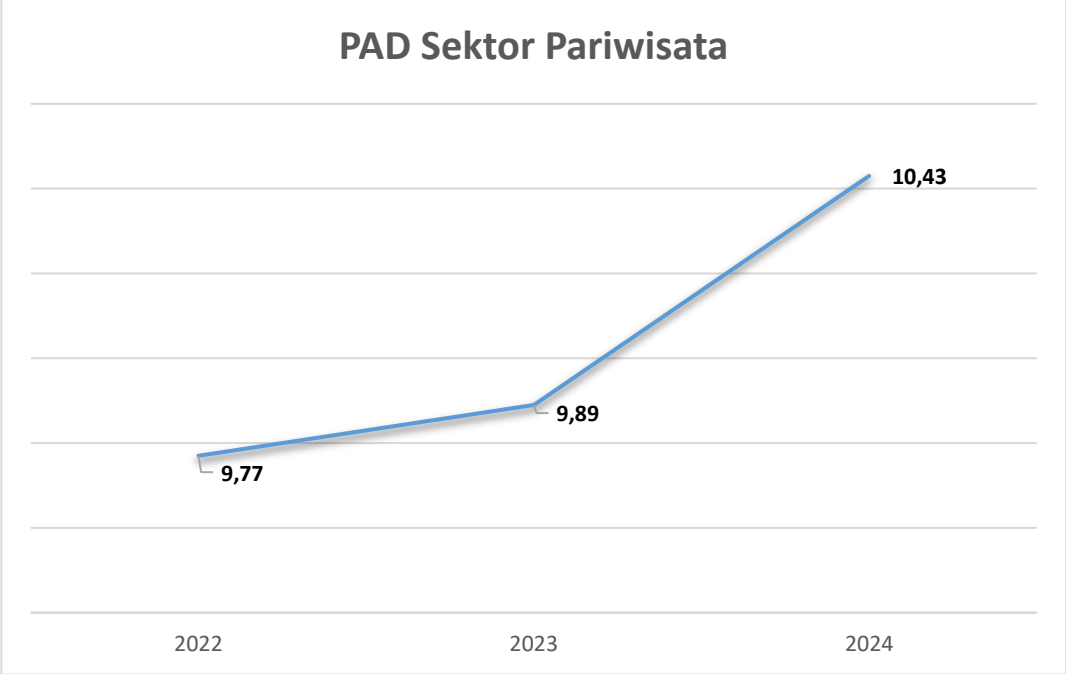

Grafik 2.7 benchmark kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

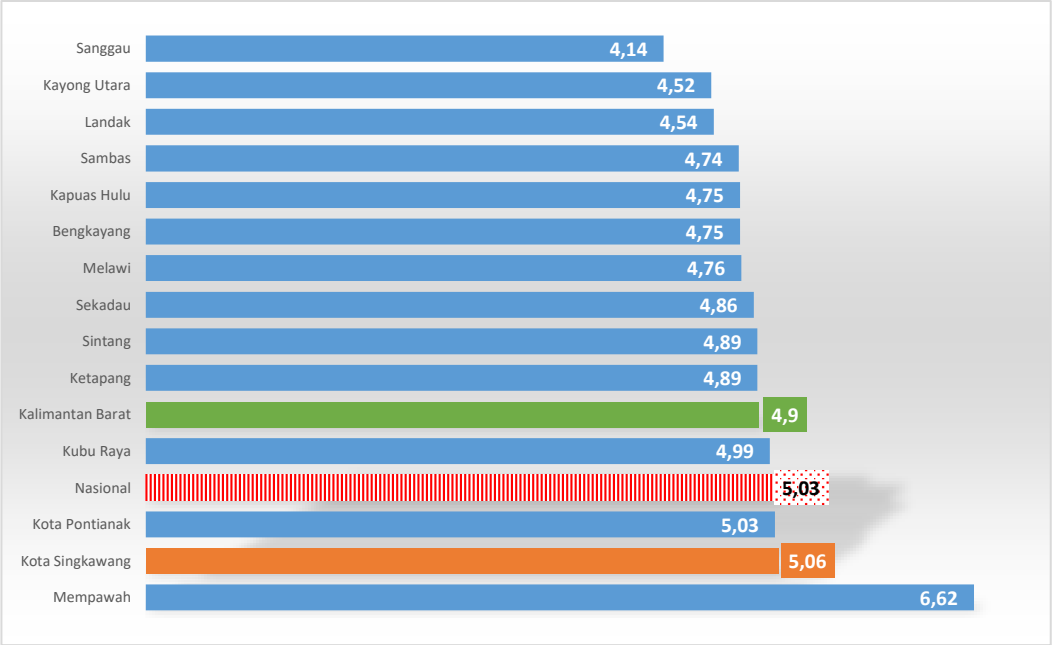

Grafik 2.8 benchmark kinerja Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2024

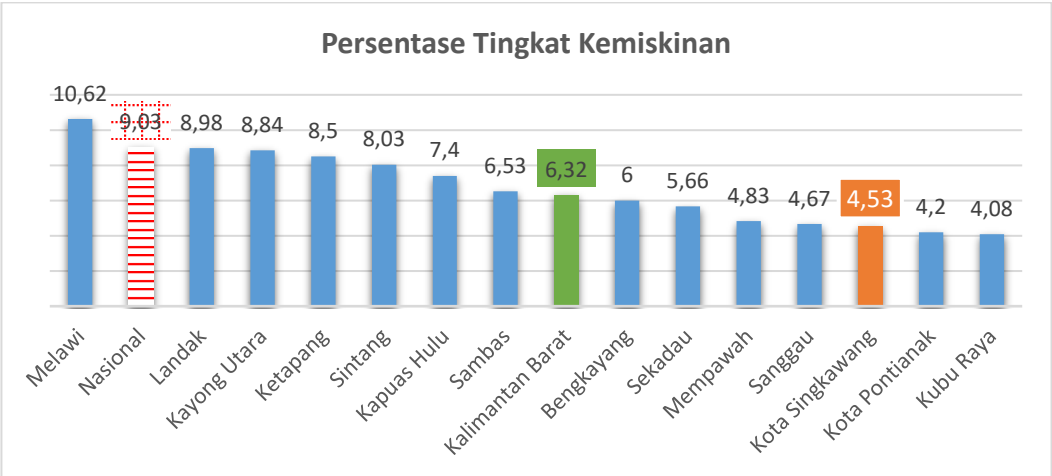

Grafik 2.9 benchmark kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

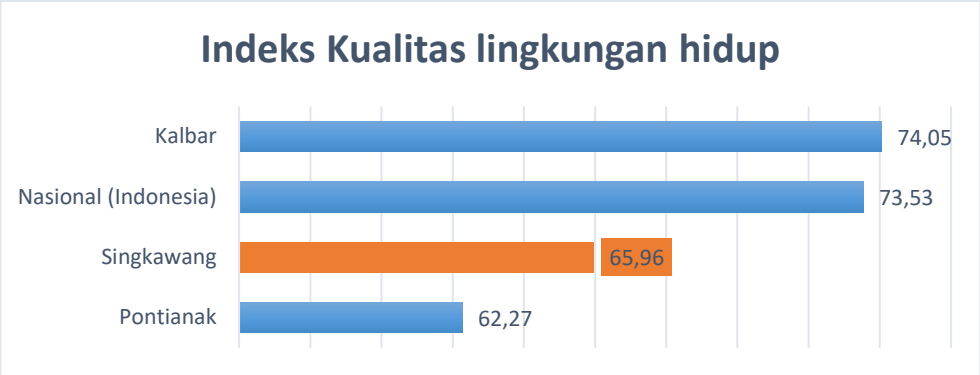

Grafik 2.10 benchmark kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2024

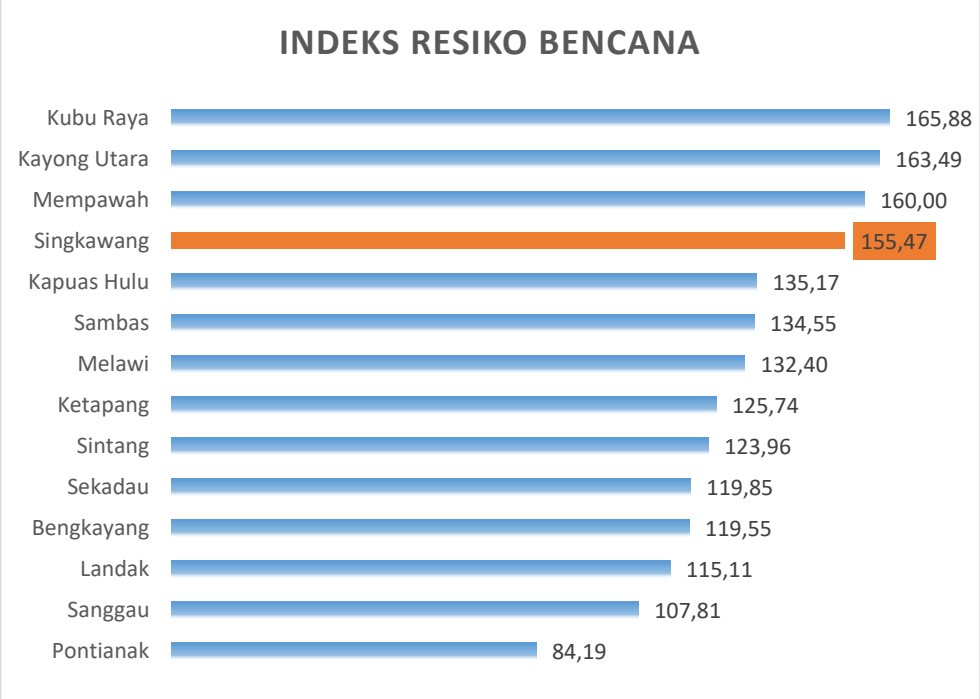

Grafik 2.11 benchmark kinerja Indeks Pelayanan Publik

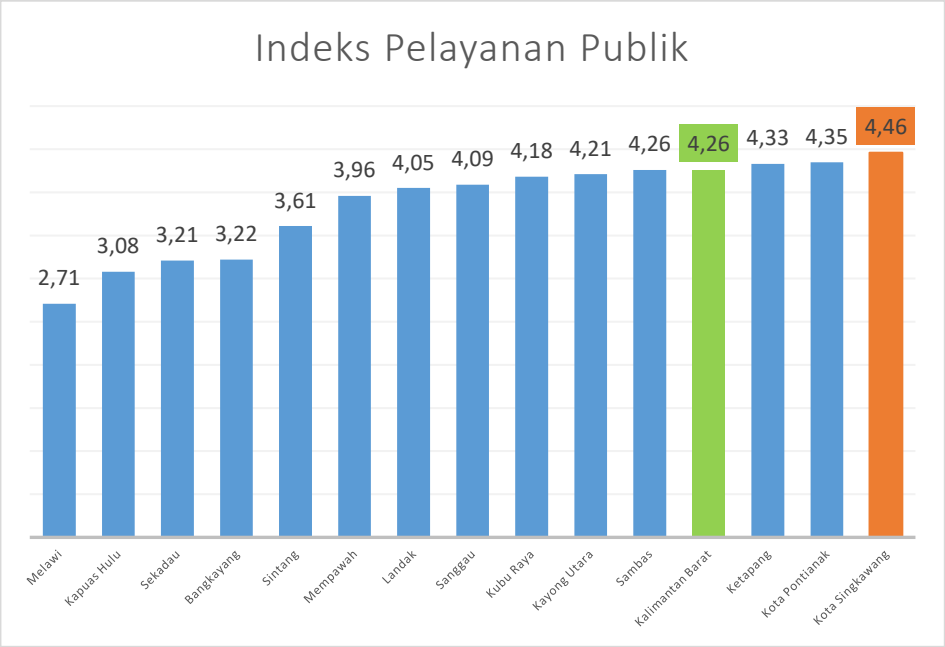

Grafik 2.12 benchmark kinerja Indeks SAKIP

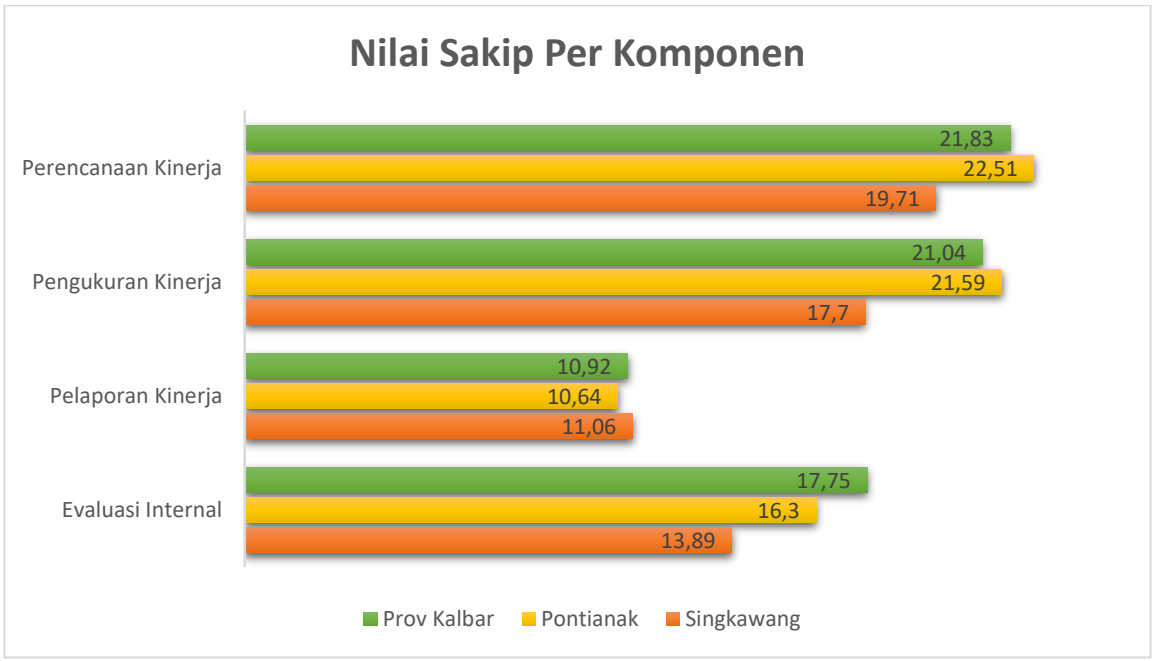

Grafik 2.13 trend Nilai SAKIP

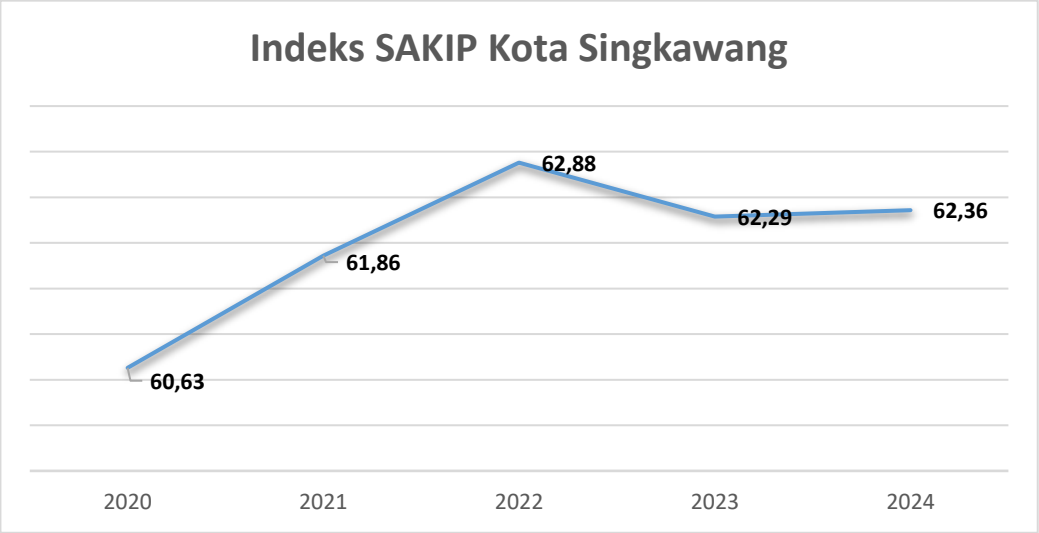

Grafik 2.14 benchmark kinerja Nilai SPBE Tahun 2024

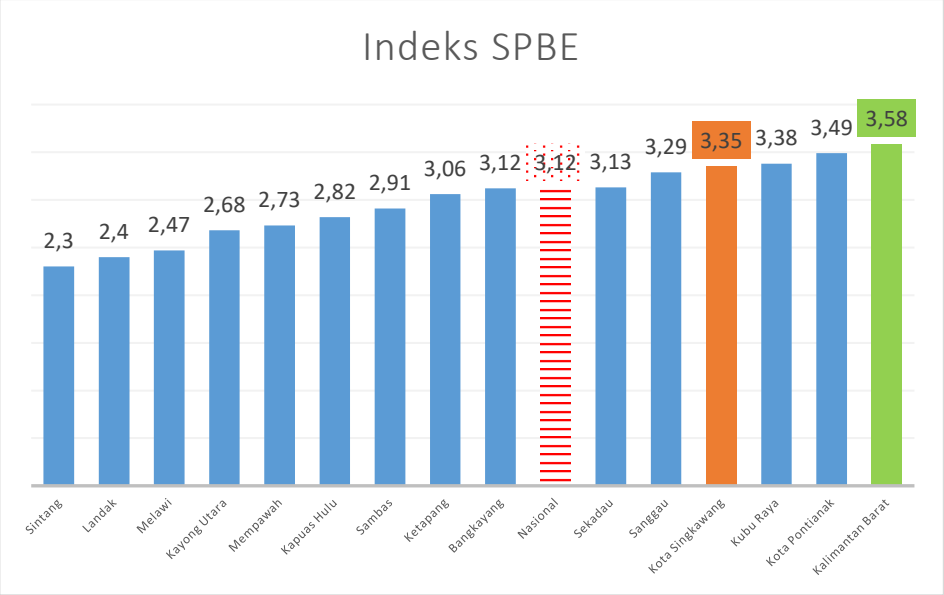

2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Umur Harapan Hidup capaian 102,26%.

   Untuk mengukur IPM dimensi umur panjang dan hidup sehat pada metode lama dilakukan dengan menggunakan indikator umur harapan hidup. Umur harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,94 tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Singkawang adalah 73,81 tahun, tahun 2023 sebesar 74,42 dan pada tahun 2024 mencapai 74,75 tahun. UHH meningkat 0,33 tahun dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023.

   Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.
   b. Mengoptimalkan pelaksanaan skrining penyakit tidak menular di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
   c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
   d. Memberikan kepastian atas jaminan kesehatan pada masyarakat tidak mampu.
   e. Meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan dari penyakit yang dapat dilindungi dengan vaksinasi.
   f. Meningkatkan pengelolaan penanganan terhadap penyakit menular.
   g. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tatanan pelayanan kesehatan.
   h. Mengoptimalkan peran jejaring Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
   i. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
   j. Mengoptimalkan Kegiatan Audit Maternal, sehingga mampu menganalisis penyebab Kematian Ibu dan upaya pencegahan agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi.

k. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
l. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tatanan pelayanan kesehatan.

Selain itu terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia kesehatan yang kurang dalam jumlah, jenis maupun kompetensi.
b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan pada jejaring pelayanan kesehatan.
c. Kepatuhan terhadap waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan masih rendah.

2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator angka harapan lama sekolah (capaian 100,08%) dan angka rata-rata lama sekolah (capaian 98,44%).

Pembangunan manusia di Kota Singkawang terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2024, status pembangunan manusia di Kota Singkawang telah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2024, IPM Kota Singkawang rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun dari 72,73 pada tahun 2020 menjadi 74,68 pada tahun 2024.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, selama periode 2020 hingga 2024. HLS 2024 adalah 12,95 meningkat 0,01 tahun dibandingkan HLS 2023 (12,94).

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Terus menerus memberikan layanan yang optimal dan maksimal kepada warga sehingga tetap mendapatkan pendidikan sekolah dasar sampai selesai, layanan tersebut berupa fasilitas pendidikan yang memadai, biaya pendidikan gratis, serta menyediakan perlengkapan belajar berupa buku pembelajaran.
- Terus meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan serta *stakeholders* terkait untuk memberikan edukasi kepada penduduk tentang

pentingnya pendidikan usia dini, dan disertai dengan bantuan pendidikan dari pemerintah kepada setiap layanan pendidikan.

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap lembaga pendidikan kesetaraan agar kualitas layanan semakin ditingkatkan sehingga lembaga dapat diakreditasi.
- Melakukan pemetaan terhadap guru sehingga mendapatkan data yang valid, sehingga pemerataan guru ke sekolah menjadi lebih baik dan memperkecil ketimpangan terhadap kekurangan guru di setiap sekolah.

Adapun yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu :

- Validasi data masih belum optimal 100% dikarenakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang belum diisi oleh operator sekolah.
- Angka partisipasi kasar jenjang TK masih rendah (di bawah 50%) dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak pada usia dini, serta fasilitas pendukung pada TK Negeri masih minim sehingga masyarakat masih harus perlu mengeluarkan biaya untuk pendidikan di TK Swasta.
- Masih terdapat guru disekolah yang belum memiliki ijazah S1 yaitu guru yang berusia 55 Tahun keatas yang enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

3. Sasaran strategis Terciptanya Masyarakat Yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Agama, dengan indikator Indeks Toleransi (capaian 98,48%).

Indeks Kota Toleransi (IKT) adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengkombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Untuk pengukuran capaian pada IKT tahun 2024 digunakan data realisasi tahun 2023 karena pada sampai dengan dibuatnya laporan ini untuk IKT tahun 2024 belum dirilis hasilnya oleh setara institute yang merupakan lembaga yang melakukan pengukuran di Indonesia.

Capaian indeks toleransi secara target belum mencapai target, akan tetapi secara peringkat Kota Singkawang masih di peringkat pertama sebagai kota paling toleran selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2022. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Menempatkan visi toleransi sebagai ruh dalam pemajuan toleransi dalam dokumen perencanaan daerah.
- Menempatkan generasi muda sebagai ujung tombak dalam menjaga kontinuitas tata kelola keberagaman yang memilik kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai pancasila.
- Keberadaan regulasi daerah yang secara nyata memberikan kontribusi dan akselerasi bagi pemajuan toleransi di Kota Singkawang.
- Melakukan berbagai inisiatif, terobosan, dan kolaborasi oleh elemen pemerintah kota dan masyarakat.
- Komitmen seluruh *stakehorders* dalam menjaga kerukunan dan toleransi di Kota Singkawang

Adapun yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu :

- Heterogennya masyarakat di Kota Singkawang sehingga rawan terjadinya gesekan sosial di masyarakat.
- Maraknya kenalakan remaja di lingkungan Kota Singkawang.

4. Sasaran strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, capaian 101,01%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 sebesar 7,92 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7 sampai 8 orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,59 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Untuk mencapai target kinerja dilakukan beberapa upaya atau strategi yaitu sebagai berikut :

- Penguatan kebijakan terhadap perusahaan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dengan sebanyak 1 Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- Pelayanan antar Kerja, dengan hasil sejumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL).
- Job Fair/Bursa Kerja, dengan hasil sejumlah pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja.
- Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran, dengan hasil sejumlah Calon Pekerja Migran Inodensia yang Terlayani sesuai Prosedur dalam Layana Terpadu Satu Atap dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang Ditangani.
- Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan, dengan hasil 114 Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama.
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dengan hasil 1 (satu) Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (Peraturan Perusahaan /Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Skala Upah, dan Lembaga Kerjasama Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dengan hasil 5 Kasus Perselisihan yang Dicegah.
- Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan hasil 3 Perkara Perselisihan yang Terselesaikan.

- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, dengan hasil 1 Asosiasi Pengusaha dan 10 Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Perkeja).
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota, dengan hasil 1 Lembaga Kerjasama Tripartit yang Dibina.
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan hasil sebanyak 1 pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dengan memfasilitasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Kegiatan Pemilu (PilPres, Pileg, dan Pilkada) sebanyak 10.181 Orang.
- Melakukan program pelatihan pencari kerja.
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Singkawang.
- Memberikan fasilitasi layanan ketenagakerjaan terkait pencegahan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan insdustrial. Indikasi keberhasilan program ini adalah dilihat dari Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan.

5. Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, dengan indikator PAD Sektor Pariwisata (capaian 107,93%).

   Sektor pariwisata berkontribusi terhadap PAD melalui penerimaan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penerimaan pajak dari sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sedangkan, jenis penerimaan retribusi daerah dari sektor pariwisata meliputi retribusi parkir, serta retribusi rekreasi dan olahraga.

Pada tahun 2022 Jumlah PAD sektor pariwisata adalah Rp24.801.996.652,76 kemudian pada tahun 2023 mencapai Rp24.490.729.775,84. Selanjutnya meningkat sejumlah Rp 4.366.193.987,88 sehingga mencapai Rp28.856.923.763,72 pada akhir tahun 2024.

Untuk mencapai target kinerja dilakukan beberapa upaya yaitu :

- Pelaksanaan berbagai event di daerah dengan melibatkan pihak swasta.
- Penyediaan sarana prasarana pada destinasi pariwisata.
- Fasilitasi pembangunan akses transportasi udara.
- Menghias dan mempercantik kota setiap perayaan hari besar keagamaan.
- Mempermudah perijinan kepariwisataan.
- Melakukan promosi pariwisata melalui media sosial, website dan media partner lainnya.
- Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan dan prioritas.
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan event.

Pada sasaran ini hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Objek destinasi pariwisata yang belum di kelola secara maksimal.
- Pengemasan daya tarik wisata masih belum optimal.
- Aksesibilitas pariwisata yang belum memadai.
- Keterbatasan sumber daya untuk dapat memfasilitasi seluruh pelaku ekonomi kreatif.

6. Sasaran strategis Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan, yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu :
   a. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dengan capaian 112,33%.

      Pertumbuhan PDRB pada tahun 2024, mengalami *rebound* dibandingkan pada 3 tahun kebelakang. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, nilai pertumbuhannya telah melampaui target. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

      - Memberikan kemudahan dalam penerbitan surat rekomendasi tanda daftar gudang.

- Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- Meningkatkan pengawasan distribusi barang perdagangan dan memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga barang.
- Mendorong pelaku usaha perdagangan untuk berinovasi dalam memperoleh peluang pasar khususnya dalam hal pemasaran produk melalui media elektronik.
- Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha perdagangan tentang manajemen usaha.

Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Masih terdapat UMKM terutama Usaha Mikro dan Kecil yang belum berbadan hukum, sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk melakukan akses terhadap berbagai lembaga formal.
- Kemampuan mengakses informasi yang rendah, juga menyebabkan sebagian besar Usaha Mikro dan Kecil belum berminat untuk mengurus berbagai perizinan usaha secara formal.

b. Distribusi PDRB sektor Pertanian dan Perikanan, dengan capaian 92,84% :

Distribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan dalam rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebesar 11,89%, di tahun 2022 turun menjadi 11,82% dan pada tahun 2024 menjadi 11,02%.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Adanya alih fungsi lahan dari lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan non produktif
- Sebagian petani padi masih bersifat subsistem, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
- Minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin berkurang karena alternatif pekerjaan di sektor lain.
- Ketergantungan petani, peternak dan nelayan terhadap bantuan pemerintah.

- Munculnya penyakit hewan menular strategis / Zoonosis.
- Pengawasan terhadap Pangan Asal Hewan (PAH) belum maksimal.

Dalam mengatasai hambatan atau kendala dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lahan-lahan yang berpotensi, meningkatkan indek pertanaman serta penggunaan bibit unggul.
- Memberikan pelatihan agribisnis serta mengubah mindset agar tidak memiliki ketergantungan pada bantuan pemerintah.
- Peningkatan kapasitas kelompok melalui diklat-diklat agar poktan kuat, mandiri dan berkembang.
- Mengoptimalkan peran dari Puskeswan dalam rangka mencegah dan mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis /Zoonosis.

7. Sasaran strategis Meningkatnya Investasi, dengan indikator Realisasi Investasi (capaian 86,62%).

Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN / Penanaman Modal Asing (PMA) setiap tahun bersifat fluktuatif. Tahun 2022 Jumlah nilai Investasi PMDN/PMA adalah Rp56,6 Milyar, Tahun 2023 meningkat menjadi Rp140,57 Milyar dan pada akhir tahun 2024 nilai investasi sebesar Rp100Milyar.

sasaran ini belum dapat dicapai sesuai target, hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Terdapat penolakan dari beberapa pelaku usaha untuk dilaksanakan pemeriksaan dan pendampingan penyelesaian masalah pelaku usaha.
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sepenuhnya menggunakan sumber anggaran DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, dan diatur sesuai juknis DAK Non Fisik melalui Peraturan Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI No. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fasilitasi Penanaman Modal tahun anggaran 2024, tidak sepenuhnya sesuai dengan standar biaya dari Pemerintah Kota, sehingga pelaksanaan dan pencairan anggaran tidak dapat optimal.

Untuk mencapai target kinerja dilakukan beberapa upaya yaitu :

- Pengembangan iklim penanaman modal dengan melakukan perbaikan kebijakan, instutisional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan sehingga diharapkan mampu mendongkrak minat investasi di Kota Singkawang.
- Melakukan promosi penanaman modal di Kota Singkawang
- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan yang dilakukan secara berkala.

8. Sasaran strategis Menurunnya Angka Kemiskinan, dengan indikator Persentase Tingkat Kemiskinan (capaian 99,34%).

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,53 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap Maret 2023. Artinya, terdapat 4,53 persen penduduk Kota Singkawang yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kota Singkawang pada Maret 2024 sebanyak 10,82 ribu orang mengalami penurunan 2,17 persen dibandingkan Maret 2023. Garis Kemiskinan Kota Singkawang pada Maret 2024 adalah sebesar Rp614.077,00/ kapita/bulan. Dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 4,34 persen. Peningkatan atau penurunan garis kemiskinan tentunya akan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2012 – Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Singkawang nilainya cukup fluktuatif. Namun dalam kurun periode Maret 2023 – Maret 2024, nilainya konsisten mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Singkawang pada Maret 2024 sebesar 0,47 menurun sebesar 0,27 dibandingkan Maret 2023. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,18 menjadi 0,10.

Dalam upaya mencapai target kinerja dilakukan upaya atau strategi sebagai berikut :

- Melakukan intensifikasi dengan melibatkan sumber daya Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan dan penerima manfaat.

- Pendapingan penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan untuk usaha ekonomi masyarakat.
- Peningkatan kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lebih optimal.
- Penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial.
- Melaksanakan program penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Penyaluran bantuan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat.
- Pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.
- Meningkatkan kolaborasi dengan unsur pentahelix dan stakeholders lainnya dalam penanganan kemiskinan.
- Pelaksanaan kerja sama penanggulangan kemiskinan yang kolaboratif.

Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Masih belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penaggulangan kemiskinan.
- Pengawasan pelaksanaan program dalam penanggulangan kemiskinan.

9. Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Daerah, dengan indikator Indeks Infrastruktur Daerah, capaian 94,51%.

Indeks Infrastruktur Daerah (IID) adalalah salah satu komponen indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja kota / kabupaten berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. IID merupakan Teknik dan praktek konstruksi untuk merencanakan, mengembangkan dan mempertahankan infrastruktur utama untuk kota / kabupaten tersebut dan masyarakatnya.

Dalam upaya pencapaian target kinerja dilakukan upaya atau strategi sebagai berikut :

- Melakukan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan infrastruktur baik jalan, jembatan serta infrastruktur transportasi.
- Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

- Peningkatan infrastruktur air dan sanitasi.
- Penguatan jaringan internet dan penerapan Smart City.
- Melakukan kemitraan publik-swasta untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi infrstruktur.

Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu terbatasnya anggaran dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur.

10. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 99,62%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen penting dalam menilai kondisi lingkungan di suatu wilayah. IKLH memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas lingkungan yang mencakup aspek air, udara dan lahan. Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 adalah 55,83%, untuk indek kualitas udara adalah 91,56% sedangkan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 36,60%.

Dalam pencapaian kinerja terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
- Belum maksimalnya pengurangan sampah.
- Pemilahan sampah oleh masyarakat yang belum terlaksana dengan baik.
- Pengendalian limbah B3 oleh masyarakat yang masih rendah.

Dalam upaya pencapaian target kinerja dilakukan upaya atau strategi sebagai berikut :

- Melakukan pencegahan pencemaran melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- Melakukan inspeksi rutin terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada didaerah sempadan sungai.
- Melakukan tindak tegas terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar peraturan pembuangan limbah industri dan domestik tidak sesuai baku mutu lingkungan.

- Melakukan pengawasan kualitas air secara berkala dengan menganalisis kualitas air yang masuk ke badan sungai atau berada pada aliran sungai.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti pencemaran air.
- Adanya aksi pembersihan sungai dan selokan secara berkala dari sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat.
- Meningkatkan fungsi penegakan aturan dalam pengelolaan lingkungan terutama terkait usaha/ kegiatan yang akan memulai pelaksanaan pembangunan yang harus sesuai dengan tata ruang.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan dengan memperhatikan dokumen lingkungan yang sudah ditetapkan.
- Rehabilitasi lahan kritis, ini mempunyai dampak kedepan dalam peningkatan kualitas lahan, hutan serta kualitas udara.
- Pemeliharaan dan peningkatan ruang terbuka hijau.
- Penerapan teknologi dalam pemrosesan sampah di fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemorosesan Akhir.
- Membentuk bank sampah unit.

11. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana, capaian 77,19%

    Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan gambaran tingkat risiko bencana diwilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan jenis bahaya (hazard) serta gabungan beberapa bahaya (multi hazard). Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas).

Capaian kinerja indeks resiko bencana belum mencapai target, adapun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Belum optimalnya penguatan kebijakan dan kelembagaan kebencanaan.
- Belum optimalnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu penanganan tematik kawasan rawan bencana.
- Belum optimalnya pengembangan sistem informasi kebencanaan.
- Belum memadainya kapasitas pendidikan dan pelatihan SDM.
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mitigasi kebencanaan.

12. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian 104,21%

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu instrumen yang menggambarkan sejauh mana kinerja instansi pemerintah mewujudkan pelayanan prima. Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kota Singkawang mengalami kenaikan 0,24 point pada Tahun 2024 dengan nilai 4,46 dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai 4,22. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2024, nilai Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kota Singkawang memiliki peringkat tertinggi dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan telah melampaui nilai Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memperoleh nilai 4,26.

Adapun upaya pencapaian kinerja dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan / pembinaan kepada unit penyelanggaraan pelayanan publik secara intensif.
- Melaksanakan pemantauan lapangan secara berkala atas pelaksanaan pelayanan publik.
- Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala atas penyelanggaran pelayanan publik.
- Melakukan tindak lanjut dan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.
- Melakukan penilaian kinerja secara mandiri atas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik yang menjadi sampel atau lokus penilaian.

Dalam pencapaian kinerja juga terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Belum optimalnya implementasi kebijakan pelayanan pada seluruh unit pelayanan publik.
- Belum optimalnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memberikan pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik.
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik karena terbatasnya anggaran.
- Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Belum optimalnya pengelolaan konsultasi dan pengaduan oleh seluruh unit pelayanan publik.
- Belum optimalnya pengembangan inovasi yang memberikan kemudahan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat/pengguna layanan.

13. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP, dengan capaian 98,67%.

Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Singkawang mengalami kenaikan 0,07 point pada Tahun 2024 dengan nilai 62,36 dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai 62,29. Kenaikan ini belum mampu mengembalikan nilai SAKIP Pemerintah Kota Singkawang pada posisi 62,88 yang diperoleh di Tahun 2022. Hal ini disebabkan terdapatnya penurunan nilai pada komponen perencanaan sehingga mempengaruhi total nilai keseluruhan yang diperoleh dari seluruh komponen meskipun 3 (tiga) komponen lainnya mengalami kenaikan.

Capaian indeks SAKIP masih belum mencapai target, adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Kualitas RPD yang masih belum sempurna terutama dalam penentuan kondisi atau sasaran strategis yang belum berorientasi pada hasil *(outcome)* dan belum menggambarkan prinsip SMART.

- Cascading/penjenjangan kinerja yang disusun belum memperhatikan prinsip penyusunan dan belum mempertimbangkan *logical framework* dan *Cricital Success Factor* (CSF).
- Pengukuran capaian kinerja yang belum sepenuhnya andal.
- Belum semua perangkat daerah mematuhi sistematika pelaporan kinerja.
- Belum optimalnya pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan.
- Hasil evaluasi internal dalam laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar akar permasalahan.
- Belum terdapat *punishmet* yang digunakan dalam implementasi AKIP.

Dalam pencapaian target dilakukan upaya yaitu sebagai berikut :

- Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP.
- Melakukan coaching terkait AKIP khususnya penjenjangan kinerja.
- Melakukan penyusunan pohon kinerja tingkat PEMDA dan Perangkat Daerah.
- Melakukan reviu dan perubahan pada Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.
- Melakukan pemanfaatan aplikasi E-SAKIP Pemerintah Kota Singkawang dalam manajemen kinerja.
- Melakukan asistensi terhadap laporan kinerja PD yang telah disusun sebelum dilakukan finalisasi.

14. Sasaran strategis Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif, dengan indikator Indeks Maturitas SPIP dengan capaian 98,82%.

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Capaian indeks Maturitas SPIP tahun 2024 masih belum didapat karena instansi yang melakukan penilaian belum merilis hasil penilian, untuk itu digunakan capaian 2023 sebagai pembanding sehingga capaian indikator ini masih belum

mencapai target, adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Kurangnya komitmen pimpinan dan budaya pengendalian terhadap SPIP, sehingga implementasinya hanya sebatas formalitas saja.
- Budaya pengendalian di lingkungan kerja masih lemah, di mana Pegawai kurang memahami pentingnya pengendalian intern dalam proses bisnis.
- Keterbatasan SDM dan Kapasitas Aparatur dalam hal ini kurangnya pemahaman Pegawai terkait SPIP, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.
- Minimnya auditor yang kompeten dalam melakukan evaluasi dan pemantauan SPIP.
- Kesadaran akan pentingnya manajemen risiko masih rendah, sehingga pengelolaan risiko tidak menjadi prioritas.
- Rekomendasi hasil audit sering tidak ditindaklanjuti, sehingga perbaikan dalam implementasi SPIP tidak terjadi.
- Terjadinya error system pada aplikasi SPIP Terintegrasi, sehingga proses pelaporan dan pemantauan SPIP menjadi lambat dan kurang akurat.
- Resistensi terhadap perubahan, Pegawai cenderung enggan beradaptasi dengan kebijakan baru, termasuk penerapan SPIP yang lebih ketat, adanya anggapan bahwa SPIP menambah beban kerja sehingga pelaksanaannya kurang maksimal dan kurangnya komunikasi yang efektif dalam menjelaskan manfaat dan urgensi SPIP kepada seluruh Pegawai.

Dalam pencapaian target dilakukan upaya yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen pimpinan dan budaya pengendalian dalam hal ini berbentuk kebijakan, alokasi anggaran, dan evaluasi berkala.
- Membentuk Tim Kerja SPIP yang aktif untuk mengawal implementasi di setiap unit kerja.
- Menanamkan budaya pengendalian intern, dengan cara menerapkan reward dan punishment dalam pelaksanaan SPIP.
- Melakukan sosialisasi rutin kepada Pegawai mengenai peran dan manfaat SPIP dalam organisasi.

- Mengadakan pelatihan dan bimtek secara berkala terkait SPIP dan manajemen risiko.
- Meningkatkan kompetensi auditor dan pejabat terkait melalui sertifikasi pengendalian intern dan manajemen risiko.
- Mendorong Pegawai untuk aktif mengikuti seminar dan workshop terkait SPIP.
- Melakukan identifikasi, pemetaan, dan analisis risiko di setiap proses bisnis organisasi.
- Melakukan *self assesment* SPIP dan melaporkan hasilnya secara periodik.
- Menerapkan mekanisme tindak lanjut hasil audit agar rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan dengan cepat.
- Meningkatkan komunikasi yang efektif mengenai pentingnya SPIP dan manfaatnya bagi organisasi.
- Melibatkan pegawai dalam penyusunan kebijakan dan implementasi SPIP, sehingga Pegawai merasa memiliki tanggung jawab dalam keberhasilannya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah.
- Melaksanakan program pelatihan mandiri dikantor dengan narasumber dari para aparatur pemeriksa yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis terkait materi pengawasan yang dilakukan setiap bulan.

15. Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengan capaian 100%.

Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu tujuan utama dalam penyusunan laporan keuangan bagi setiap instansi pemerintah. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandakan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini ini juga mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Singkawang meraih opini WTP sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Dalam upaya mencapai opini WTP pada laporan keuangan, dilakukan strategi atau kiat yaitu sebagai berikut :

- Penguatan komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder (antar SKPD maupun dengan instansi eksternal terkait).
- Memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam optimalisasi pelaksanaan tugas.
- Melakukan pengembangan SDM Pengelolaan Keuangan melalui pendidikan dan pelatihan.
- Penyusunan dan pengesahaan APBD yang selalu tepat waktu.
- Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan SKPD yang optimal.
- Penyajian laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintah.

16. Sasaran strategis Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, dengan indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas dengan capaian 100%.

Pemerintah Kota Singkawang konsisten dalam melaksanakan pembangunan zona integritas pada unit kerja-unit kerja yang ditetapkan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2024. Unit kerja yang melaksanakan pembangunan zona integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang mengalami peningkatan dari yang semula berjumlah 2 (dua) unit kerja di Tahun 2019, mengalami kenaikan pada Tahun 2024 menjadi 12 (dua belas) unit kerja. Pengusulan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM selalu disampaikan kepada TPN setiap tahunnya hingga Tahun 2024. Pada tahun 2024, unit kerja yang diusulkan belum berhasil memperoleh predikat WBK, namun Pemerintah Kota Singkawang telah memiliki 1 (satu) unit kerja yang memperoleh predikat WBK pada Tahun 2023 yaitu UPT Puskesmas Singkawang Selatan II.

Dalam upaya pencapaian kinerja, dilakukan strategi atau kiat yaitu sebagai berikut :

- Penguatan komitmen dari seluruh perangkat daerah/unit kerja dalam pembangunan zona integritas.
- Melaksanakan pembinaan terhadap unit kerja pembangunan zona integritas.

- Melakukan kunjungan atau benchmark kinerja ke unit kerja pembangunan ZI berpredikat WBK/WBBM.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI.
- Mendorong untuk unit kerja pembangunan ZI membangun budaya inovasi yang berdampak kepada capaian sasaran strategis dan pelayanan kepada masyarakat.
- Memberikan reward kepada unit kerja yang telah berhasil membangun unit kerja pembangunan ZI.

Adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Komitmen pembangunan ZI pada unit kerja belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik pada seluruh jajaran di unit kerja.
- Inovasi yang dibangun belum cukup memberikan dampak terhadap isu strategis dan pelayanan kepada masyarakat.
- Penerapan manajemen risiko yang belum optimal dan belum disertai dengan evaluasi secara berkelanjutan.
- Sistem pengawasan belum diimplementasi secara optimal.

17. Sasaran strategis Meningkatnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan, dengan indikator Indeks SPBE dengan capaian 100,30%.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, yaitu 47 indikator berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Dalam upaya pencapaian kinerja, dilakukan strategi atau kiat yaitu sebagai berikut :

- Penerapan kebijakan internal audit TIK.
- Melakukan reviu kebijakan tim koordinasi SPBE.
- Melakukan inovasi proses bisnis pada aspek perencanaan strategis SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

- Penyediaan prosedur pembangunan aplikasi, layanan pusat data dan layanan jaringan intra sesuai standar yang ditetapkan dan telah dilakukan reviu dan evaluasi berkelanjutan.
- Melakukan reviu dan evaluasi terhadp program kerja Tim koordinasi SPBE IPPD.
- Pemenuhan dan penerapan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Belum adanya dokumen kebijakan internal pembangunan aplikasi, kebijkan internal layanan pusat data dan kebijakan internal manajemen keamanan informasi.
- Belum tersedianya peta rencana dan perumusan rencana dan anggaran SPBE.
- Pemerintah Kota Singkawang masih belum menjalankan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi dan Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Layanan SPBE sepenuhnya sesuai ketentuan, dimana tidak tersedianya peta rencana yang utuh dan pedoman pelaksanaan manajemen SPBE.
- Belum menjalankan audit TIK sesuai dengan ketentuan, baik audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan.

18. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia ASN, dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian 119,56%

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Capaian indeks profesionalitas ASN tahun 2024 masih belum didapat karena instansi yang melakukan penilaian belum merilis hasil penilaian, untuk itu digunakan capaian 2023 sebagai pembanding.

Dalam upaya pencapaian kinerja, dilakukan strategi atau kiat yaitu sebagai berikut :

- Melaksanakan peningkatan kompetensi ASN.

- Menyusun kebijakan dan penerapan terkait kode etik ASN.
- Melaksanakan optimalisasi kinerja melalui evaluasi kinerja secara berkala.
- Melakukan penguatan manajemen karier ASN.
- Melakukan pemanfaatn SPBE dalam manajemen kepegawaian.

Adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Formasi kebutuhan SDM yang ditetapkan masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan SDM di Pemerintah Kota Singkawang.
- Realokasi dan refocussing anggaran program dan kegiatan yang berakibat tertundanya beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM.
- Pemetaan dan penyusun dokumen kebutuhan pengembangan sumber daya manusia masih belum optimal.

2.3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.7

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,1	74,75	102,26%	51.223.355.766	48.375.156.524	94,44%	
	Capaian Kinerja			**102,26%**	**% Capaian Anggaran**		**94,44%**	**7,82%**
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,94	12,95	100,08%	88.582.952.515	87.171.508.022	98,41%	
	Rata-rata Lama Sekolah	8,35	8,22	98,44%				
	Rata-Rata Capaian Kinerja			**99,26%**	**% Capaian Anggaran**		**98,41%**	**n/a**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Terciptanya Masyarakat Yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Kota Toleran	6,60	6,5	98,48%	25.717.210.580	25.648.565.093	99,73%	
				Capaian Kinerja **98,48%**			**% Capaian Anggaran** **99,73%**	**n/a**
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8	7,92	101,01%	1.538.177.922	1.491.436.176	96,96%	
				Capaian Kinerja **101,01%**			**% Capaian Anggaran** **96,96%**	**4,05%**
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	9,83	10,43	106,10%	1.672.022.920	1.659.128.589	99,23%	
				Capaian Kinerja **106,10%**			**% Capaian Anggaran** **99,23%**	**6,87%**
Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6	6,74	112,33%	3.396.089.807	3.225.065.025	94,96%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Distribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	11,87	11,02	92,84%	10.398.765.356	7.885.713.151	75,83%	
	Rata-Rata Capaian Kinerja			**102,59%**	**% Capaian Anggaran**		**75,83%**	**26,75%**
Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	6,5	5,63	86,62%	1.934.099.638	1.571.795.411	81,27%	
	Capaian Kinerja			**86,62%**	**% Capaian Anggaran**		**81,27%**	**n/a**
Menurunya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,50	4,53	99,34%	4.652.553.555	4.208.488.477	90,46%	
	Capaian Kinerja			**99,34%**	**% Capaian Anggaran**		**90,46%**	**n/a**
Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	68,67	64,9	94,51%	113.949.925.715	112.413.018.434	98,65%	
	Capaian Kinerja			**94,54%**	**% Capaian Anggaran**		**98,65%**	**n/a**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,21	65,96	99,62%	5.701.888.783	5.482.657.979	96,16%	
			Capaian Kinerja	**99,62%**		**% Capaian Anggaran**	**96,16%**	**n/a**
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks resiko Bencana	120	155,47	77,19%	4.112.955.810	3.734.822.525	90,81%	
			Capaian Kinerja	**73,97%**		**% Capaian Anggaran**	**90,81%**	**n/a**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28	4,46	104,21%	55.375.007.940	49.967.428.774	90,23%	
			Capaian Kinerja	**104,21%**		**% Capaian Anggaran**	**90,23%**	**13,97%**
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	63,2	62,36	98,67%	33.155.972.282	31.986.643.857	96,47%	
			Capaian Kinerja	**98,67%**		**% Capaian Anggaran**	**96,47%**	**n/a**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP	3,30	3,261	98,82%	1.596.738.284	1.458.204.295	91,32%	
				Capaian Kinerja	**98,82%**	**% Capaian Anggaran**	**91,32%**	**n/a**
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%	9.908.888.734	7.424.447.401	74,93%	
				Capaian Kinerja	**100,00%**	**% Capaian Anggaran**	**74,93%**	**25,07%**
Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1,5	1,5	100,00%	55.375.007.940	49.967.428.774	90,23%	
				Capaian Kinerja	**100,00%**	**% Capaian Anggaran**	**90,23%**	**9,77%**
Meningkatnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan	Indeks SPBE	3,34	3,35	100,30%	1.904.905.974	1.821.285.778	95,61%	
				Capaian Kinerja	**100,30%**	**% Capaian Anggaran**	**95,61%**	**4,69%**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Indeks Profesionalitas ASN	62,72	74,99	119,56%	9.636.101.840	9.021.457.932	93,62%	
	Capaian Kinerja			**119,56%**	**% Capaian Anggaran**		**93,62%**	**25,94%**
Rata-Rata Seluruh Capaian				**99,61%**	**479.832.621.361**	**454.514.252.217**	**94,72%**	

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 9 sasaran strategis yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yaitu pada sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 101,41%, capaian anggaran sebesar 94,44%, dengan tingkat efisiensi sebesar 6,97%.
b. Menurunnya Tingkat Pengangguran dengan capaian kinerja 101,01%, capaian anggaran sebesar 96,96%, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,05%.
3. Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dengan capaian kinerja 106,10%, capaian anggaran sebesar 99,23%, dengan tingkat efisiensi sebesar 6,87%.
4. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan dengan capaian kinerja 102,59%, capaian anggaran sebesar 75,83%, dengan tingkat efisiensi sebesar 26,75%.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 104,21%, capaian anggaran sebesar 90,23%, dengan tingkat efisiensi sebesar 13,97%
6. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan capaian kinerja 100%, capaian anggaran sebesar 74,93%, dengan tingkat efisiensi sebesar 25,07%.
7. Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas dengan capaian kinerja 100%, capaian anggaran sebesar 90,23%, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,77%.
8. Meningkatnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan dengan capaian kinerja 100,30%, capaian anggaran sebesar 95,61%, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,69%.
9. Meningkatnya Kualitas SDM ASN dengan capaian kinerja 119,56%, capaian anggaran sebesar 93,62%, dengan tingkat efisiensi sebesar 25,94%

Dari seluruh seluruh capaian kinerja didapat rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar **99,61%** dengan realisasi anggaran sebesar **94,72%**.

2.3.8 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja perubahan yang masuk dalam kategori Berhasil dan Sangat Berhasil adalah pencapaian pada sasaran :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan capaian 80% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
      - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
      - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
      - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota.
   b. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
      - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
      - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
      - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan capaian 20% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
   - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota.
   - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

   a. Pengelolaan pendidikan, dengan capaian 107% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
      - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
      - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
      - Pengelolaan Pendidikan Non Formal.

   b. Pengembangan kurikulum, dengan capaian 144,5% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Penetapanan Kurikulum Muata Lokal Pendidikan Dasar.
      - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

   c. Pendidik dan tenaga kependidikan, dengan capaian 99,16% dilaksanakan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

3. Menurunnya Tingkat Pengangguran, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penempatan Tenaga Kerja, dengan capaian 269,36% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota .
      - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
      - Perlindungan PMI di daerah Kabupaten/Kota.
   b. Hubungan Industrial, dengan capaian 64,67% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
      - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Perencanaan Tenaga Kerja, dengan capaian 140%% dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
   d. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
      - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
   e. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, dengan capaian 132,2% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota.
      - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
      - Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

f. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, dengan capaian 137% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
   - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota.
   - Wirausaha muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, dengan capaian 105% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
      - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
      - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
   b. Pemasaran pariwisata, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
   c. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan capaian 134% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
      - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
   d. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

5. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
   b. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan capaian 96,78% dilaksanakan dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
   d. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
   e. Pengembangan UMKM, dengan capaian 83,75% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
   f. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
   g. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
   h. Standarisasi dan perlindungan konsumen, dengan capaian 95% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

i. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, dengan capaian 112% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
   - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.

j. Perencanaan dan pembangunan industri, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

k. Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

l. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
   - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

m. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pengembangan Prasarana Pertanian.
   - Pembangunan Prasarana Pertanian.
   - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum.

n. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan

Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

o. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota.
   - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
   - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
   - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.
p. Penyuluhan pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
q. Pengelolaan perikanan tangkap, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
   - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
r. Pengelolaan perikanan budidaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
   - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
s. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

t. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
   - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
   - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

u. Penanganan kerawanan pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
   - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

v. Pengawasan Keamanan Pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 99,53% dilaksanakan dengan kegiatan penataan organisasi.
   b. Pendaftaran Penduduk, dengan capaian 80,82% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
      - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk.
      - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk.
   c. Pencatatan Sipil, dengan capaian 73,81% dilaksanakan dengan kegiatan:
      - Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
      - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
   d. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Kegiatan Pengumpuluan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

e. Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan.

f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan capaian 97% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.
- Pembahasan KUA dan PPAS.
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- Pembahasan APBD.
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Pendalaman Tugas DPRD.
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
- Penyusunan Program Kerja DPRD.
- Pelaksanaan Reses.
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

g. Pembinaan perpustakaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
h. Pengelolaan arsip, dengan capaian 92,34% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
i. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan capaian 101,2% dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan.
j. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan capaian 94% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan.
    - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
k. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian 93,3% dilaksanakan dengan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.
l. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan capaian 87,6% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah.
    - Pembinaan RT.

7. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
    a. Pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
        - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
        - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
        - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
        - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah.

b. Pengelolaan barang milik daerah, dengan capaian 120% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan barang Milik Daerah.
c. Pengelolaan pendapatan daerah, dengan capaian 139% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
d. Penyelenggaraan pengawasan, dengan capaian 99,2% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
e. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, dengan capaian 79% dilaksanakan dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

8. Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 99,53% dilaksanakan dengan kegiatan penataan organisasi.
   b. Pendaftaran Penduduk, dengan capaian 80,82% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
      - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk.
      - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk.
   c. Pencatatan Sipil, dengan capaian 73,81% dilaksanakan dengan kegiatan:
      - Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
      - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
   d. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Kegiatan Pengumpuluan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
      - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

e. Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan.
f. Pembinaan perpustakaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
g. Pengelolaan arsip, dengan capaian 92,34% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
h. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan capaian 101,2% dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan.
i. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan capaian 94% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan.
    - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
j. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian 93,3% dilaksanakan dengan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.
k. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan capaian 87,6% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah.
    - Pembinaan RT
l. Penyelenggaraan pengawasan, dengan capaian 99,2% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
m. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, dengan capaian 79% dilaksanakan dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

9. Meningkatnya Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
    a. Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik, dengan capaian 101% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    b. Pengelolaan Aplikasi informatika, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
        - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
        - Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
    c. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
    d. Penyelenggaraan statistik sektoral, dengan capaian 98% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota.
10. Meningkatnya Kualitas SDM ASN, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
    a. Kepegawaian daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
        - Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.
        - Mutasi dan Promosi ASN.
        - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
    b. Pengembangan sumber daya manusia, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
        - Pengembangan Kompetensi ASN.
        - Pengambangan Kompetensi Teknis.
        - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Terciptanya Masyarakat Yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Agama, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan capaian 95% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
   b. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
   c. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
   d. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
   e. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan capaian 81% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

2. Meningkatnya Investasi, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengembangan iklim penanaman modal, dengan capaian 78% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
      - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
   b. Promosi Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Pelayanan Penanaman Modal, dengan capaian 95% dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
   d. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menurunya Angka Kemiskinan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pemberdayaan Sosial, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Rehabilitasi Sosial, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan:
      - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
      - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial.

c. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

d. Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan capaian 111% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pemeliharaan Anak Anak Terlantar.
   - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Penanganan Bencana, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan:
   - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
   - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

f. Pengendalian penduduk, dengan capaian 123% dilaksanakan dengan kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

g. Pembinaan keluarga berencana (KB), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

   Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

4. Meningkatnya Infrastruktur Daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

   a. Perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dengan capaian 137% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pengembangan perumahan, dengan capaian 67% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
c. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan capaian 82% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dengan capaian 49,56% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan capaian 75% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
f. Kawasan permukiman, dengan capaian 125% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualiatas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha.
g. Penyelenggaraan jalan, dengan capaian 111% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
h. Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan capaian 128% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
    - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
i. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

j. Pengelolaan sumber daya air (SDA), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu area Kabupaten / Kota.
   - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

k. Penataan bangunan gedung, dengan capaian 105% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

l. Penyelenggaraan penataan ruang, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
   - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota.
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

m. Penataan bangunan dan lingkungannya, dengan capaian 75% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

n. Penyelesaian sengketa tanah garapan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.

o. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

p. Penatagunaan tanah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
      - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
      - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
   b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
   c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   d. Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan capaian 100%.
   e. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan capaian 104% dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   f. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

g. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
h. Pengelolaan Persampahan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

6. Meningkatnya Ketahanan Bencana, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penanggulangan bencana, dengan capaian 89,69% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota.
      - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
      - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
      - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
   b. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
   c. Penanganan Bencana, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
      - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
      - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
7. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan capaian 97% dilaksanakan dengan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan capaian 97% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
c. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan capaian 99% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan.
    - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
d. Perekonomian dan Pembangunan, dengan capaian 97,6% dilaksanakan dengan kegiatan :
    - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
    - Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
    - Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
e. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 99,53% dilaksanakan dengan kegiatan penataan organisasi.
f. Penyelenggaraan pengawasan, dengan capaian 99,2% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
g. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, dengan capaian 79% dilaksanakan dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

8. Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengawasan, dengan capaian 99,2% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
b. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, dengan capaian 79% dilaksanakan dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

2.3.9 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya perbaikan kedepan akan dilakukan dan dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas kinerja dan sistem kerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kinerja guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus pelayan publik.
5. Melakukan inovasi sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.
6. Melakukan MoU dan/atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang telah berhasil dalam pencapaian kinerja atau terhadap hal yang dianggap lebih baik dan dapat diterapkan di Pemerintah Kota Singkawang.
7. Memanfaatkan unsur pentahelix terhadap penanganan isu strategis daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BPKAD Nomor 100.2.21/269/SET/2025 tanggal 17 Februari 2025, pada Tahun 2024 Kota Singkawang tidak menerima pembiayaan Tugas Pembantuan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kab/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 terdiri atas:

a. Pendidikan anak usia dini;
b. Pendidikan dasar; dan
c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Pendidikan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENERIMA LAYANAN DASAR	TARGET MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100% (sesuai jumlah anak yang akan dipenuhi)
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100% (sesuai jumlah anak yang akan dipenuhi)
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100% (sesuai jumlah anak yang belum menyelesaikan pendidikan yang akan dipenuhi)

4.1.3 Realisasi

Realisasi capaian SPM bidang Pendidikan sebagai berikut:

No	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	9.067	3.236	35,69%	100,00%	98,86%	98,86%	67,28%
2	Pendidikan Dasar	42.147	37.150	88,14%	100,00%	98,41%	98,41%	93,28%
3	Pendidikan Kesetaraan	672	312	46,43%	100,00%	96,36%	96,36%	71,40%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 di anggarkan melalui APBD Tahun 2024 serta pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	Pendidikan Dasar	81.444.995.193,00	80.146.979.127,37	98,41%
2	Pendidikan Anak Usia Dini	4.615.886.764,00	4.563.359.850,00	98,86%
3	Pendidikan Kesetaraan	1.114.392.622,00	1.073.842.300,00	96,36%

4.1.5 Dukungan Personil

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang selaku pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan didukung dengan jumlah personil sebagai berikut :

NO	DISTRIBUSI SDM	JUMLAH PERSONIL
1	KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	51
2	PAUD	40
3	SD	1.133
4	SMP	499
JUMLAH		1.723

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal terutama pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Masih terdapat anak yang belum terlayani dalam lembaga PAUD dikarenakan tempat pelayanan pendidikan PAUD masih kurang;
4. Perlunya penambahan Unit Sekolah Baru untuk TK Negeri karena masih banyak anak usia 5-6 Tahun yang belum mendapatkan pendidikan TK dikarenakan biaya yang cukup besar untuk masuk ke TK Swasta;
5. Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat;
6. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran;
7. Terdapat tenaga pendidik yang masih belum memenuhi standar kualifikasi DIV/S-1;
8. Kurangnya tenaga pendidik PNS di jenjang SD dan SMP;
9. Tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan masih sangat sedikit, sehingga tenaga pendidik di sekolah merangkap menjadi tenaga kependidikan, dan mengakibatkan tenaga pendidik tidak dapat fokus dalam prose pembelajaran di kelas;

b. Solusi

1. Melakukan program kegiatan prioritas di Pelayanan Pendidikan PAUD dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan.
2. Mengajukan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun fasilitas pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri agar pelayanan pendidikan anak usia dini tidak diperlukan pemungutan biasa dari masyarakat.
3. Mengadakan pelatihan terhadap tenaga pendidik (guru) mengenai penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

4. Menambah tenaga pendidik melalui proses perekrutan PPPK oleh Pemerintah Kota Singkawang
5. Melakukan kajian terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kab/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 terdiri atas :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi (HIV)

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan pada semua indikator adalah 100% (seratus persen):

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan Kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

4.2.3 Realisasi

Realisasi capaian yang mampu dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana pada SPM Kesehatan tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi anggaran dan dukungan sumber daya manusia kesehatan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET SASARAN	HASIL CAPAIAN	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	3.809	3.067	80,52
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	3.809	3.327	87,35
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3.696	3.239	87,64
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	19.005	6.390	33,62
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	42.147	28.630	67,93
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	160.418	45.208	28,18
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan Kesehatan usia lanjut sesuai standar	23.905	10.863	45,44

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET SASARAN	HASIL CAPAIAN	%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	76.165	9.736	12,78
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6.297	3.740	59,39
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	496	389	78,43
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6.025	7.583	125,86
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6.603	5.237	79,31

4.2.4 Alokasi Anggaran

Anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang pada Tahun 2024, bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan dan Dana Alokasi Umum dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebesar Rp. 1.859.686.292,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagaimana tertera dibawah ini :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR SPM	JUMLAH DANA (Rp.)
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	237.883.200
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	97.808.400
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	23.814.400
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	15.982.800
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	489.366.800
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	115.216.930
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	43.230.180

NO.	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR SPM	JUMLAH DANA (Rp.)
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	12.540.000
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)	3.960.000
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	12.000.000
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKOLOSIS (TB)	685.883.582
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	122.000.000
	TOTAL ANGGARAN	1.859.686.292

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk menerapkan pencapaian SPM Kesehatan tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan tentunya perlu didukung oleh sumber daya manisia kesehatan dalam yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan formasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak dalam pencapaian SPM disamping secara berkesinambungan melakukan peningkatan terhadap kompetensi SDM kesehatan selaku pemberi pelayanan. Berikut ini adalah data dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam penerapan pencapaian SPM Kesehatan di Kota Singkawang pada tahun 2024 berdasarkan indikator SPM, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	SDM	KETERANGAN
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1804	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi : 6 Tenaga kesehatan : Perawat : 1138 Tenaga kesehatan : Bidan : 416 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian :165 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 79
2	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1804	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi : 6 Tenaga kesehatan : Perawat : 1138 Tenaga kesehatan : Bidan : 416 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian :165 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 79

NO.	INDIKATOR	SDM	KETERANGAN
3	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2620	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak : 7 Tenaga kesehatan : Bidan : 416 Tenaga kesehatan : Perawat : 1138 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian : 165 Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 79 Kader Kesehatan : 805
4	Persentase Balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2628	Tenaga medis : Dokter : 105 Tenaga kesehatan : Bidan : 416 Tenaga kesehatan : Perawat : 1138 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 79 Guru PAUD : 85 Kader Kesehatan : 805
5	Persentase Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2715	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi : 37 Tenaga kesehatan : Bidan : 416 Tenaga kesehatan : Perawat : 1138 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 79 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian : 165 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat : 35 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru : 40 Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor : 805
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	Tenaga medis : Dokter : 10 Tenaga kesehatan : Bidan : 20 Tenaga kesehatan : Perawat : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi :10 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat : 10 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu : 20
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan Kesehatan usia lanjut sesuai standar	1968	Tenaga medis : Dokter : 105 Tenaga kesehatan : Bidan : 416 Tenaga kesehatan : Perawat : 1138 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 79 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat : 35 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu : 295
8	Persentase Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80	Tenaga medis : Dokter : 10 Tenaga kesehatan : Bidan : 10 Tenaga kesehatan : Perawat : 20 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku : 10 Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat : 10
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	90	Tenaga medis : Dokter : 10 Tenaga kesehatan : Bidan : 20 Tenaga kesehatan : Perawat : 20 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi : 10 Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) : 10

NO.	INDIKATOR	SDM	KETERANGAN
10	Persentase Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	40	Tenaga kesehatan : Dokter : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih) : 10 Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. : 10 Tenaga profesional lainnya : 10
11	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	115	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru : 23 Tenaga kesehatan : Perawat : 15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian : 15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat : 10 Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) : 28 Tenaga kesehatan : Radiografer : 4 Kader Kesehatan : 20
12	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin : 10 Tenaga kesehatan : Bidan : 10 Tenaga kesehatan : Perawat : 10 Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) : 10 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan Masyarakat : 10 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan : 20

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Pada tabel dibawah ini diuraikan tentang permasalahan yang ditemukan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan dan Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun yang akan datang:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamikannya sedini mungkin 2. Data pelayanan ibu hamil masih belum optimal dari faskes 3. Belum semua faskes terutama klinik dan PMB tersedia dokter dan alat USG untuk melayani pemeriksaan kehamilan 4. Belum semua dokter dilatih penggunaan USG	1. Melakukan promosi tentang pelayanan Kesehatan ibu hamil baik di posyandu, masyarakat maupun lintas sector 2. Membentuk kelas ibu hamil di setiap kelurahan 3. Melakukan rapat pembentukan dan evaluasi skrining layak hamil dengan melibatkan puskesmas, klinik dan PMB yang ada dimkota Singkawang secara berkala 4. Melakukan pertemuan rutin program kesehatan ibu dan anak bagi petugas kesehatan puskesmas se kota Singkawang 5. Supervisi layanan dan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
			program KIA dan gizi dalam pengelolaan posyandu 6. Menghimbau dokter untuk mengikuti pelatihan USG secara daring
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Masih ditemukan pertolongan persalinan oleh tenaga non Kesehatan 2. Masih belum optimalnya Data pelayanan persalinan yang disampaikan oleh faskes	1. Melakukan promosi pelayanan pertolongan persalinan yang aman kepada masyarakat 2. Melakukan rapat pembentukan dan evaluasi skrining layak hamil, dengan melibatkan tenaga bidan di puskesmas, klinik dan PMB yang ada di kota Singkawang secara berkala 3. Melakukan koordinasi lintas sector terkait dengan pembinaan dukun bayi 4. Melakukan audit kasus kematian ibu 5. Melakukan rapat secara rutin program Kesehatan ibu bersalin secara berkala bagi petugas puskesmas 6. Membuat links pencatatn dan pelaporan data persalinan secara online
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Masih belum optimalnya data pelayanan BBL yang disampaikan oleh faskes 2. Masih kurangnya keterampilan petugas Kesehatan dalam perawatan BBL 3. Masih terdapat persalinan oleh tenaga non Kesehatan sehingga pelayanan BBL tidak sesuai standar	1. Melakukan supervisi pelayanan BBLke faskes dan RSU 2. Supervise layanan KIA ke puskesmas 3. Pertemuan program anak Tingkat Kota 4. Pendampingan tim ahli / dokter spesialis anak ke puskesmas se kota singkawang 5. Pembentukan kelas ibu balita 6. Promosi pelayanan Kesehatan BBL sesuai standar di posyandu dan di kelas ibu hamil 7. Membuat links pencatatan dan pelaporan data pelayanan BBL secara online
4	Pelayanan Kesehatan balita	1. Masih rendahnya partisipasi keluarga untuk memeriksakan Kesehatan balita secara rutin setiap bulan 2. Masih terdapat balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap	1. Promosi terkait pelayanan Kesehatan balita di masyarakat dan lintas sector 2. Mengadakan pelatihan kader posyandu 3. Pengadaan alat antropometri di posyandu 4. Pembentukan kelas ibu balita

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3. Belum semua kader terlatih dalam pelayanan balita di posyandu 4. Masih terdapat wilayah yang tidak terpantau posyandu/ sasaran terlalu besar 5. Masih ada posyandu yang belum memiliki peralatan antropometri sesuai standar 6. Pencatatan dan pelaporan pelayanan balita di faskes belum maksimal	di kelurahan 5. Supervisi pelayanan Kesehatan balita di faskes 6. Kunjungan rumah pada balita yang tidak datang ke posyandu 7. Pembentukan posyandu baru 8. Pembinaan program Kesehatan anak di puskesmas 9. Membuat dashboard pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan balita secara online
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Melebihi taget yang ditentukan	1. Melakukan persiapan pelayanan Kesehatan anak usia penddikan dasar 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan anak usia Pendidikan dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Riskesdas besar. 2. Kompetensi SDM dalam memberikan standar pelayanan pada usia reproduktif belum memadai. 3. Kesadaran masyarakat usia produktif melakukan skrining sesuai standar masih rendah.	1. Memberikan KIE kepada Masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar di fasyankes. 2. Peningkatan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan usia reproduktif sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Kurangnya partisipasi keluarga untuk memeriksakan Kesehatan lansia ke petugas Kesehatan 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan keshatan lansia belum optimal 3. Masih kurangnya tenaga Kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan lansia 4. Peralatan posyandu lansia masih kurang	1. Promosi pelayanan Kesehatan lansia ke masyarakat dan lintas sector 2. Kunjungan rumah pada lansia yang bermasalah kesehatan 3. Supervise program Kesehatan lansia ke 4. faskes 5. Melakukan pendampingan ke penanggung jawab program lansia puskesmas 6. Mengajukan permohonan peralatan lansia kit untuk posyandu ke Dinkes propinsi
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1. Sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Riskesdas besar. 2. Kepatuhan penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan	1. Meningkatkan kepatuhan penderita Hipertensi untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke Puskesmas. 2. Memberikan KIE kepada Masyarakat untuk melakukan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		secara rutin setiap bulan rendah.	deteksi dini terhadap pelayanan Kesehatan usia produktif.
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1. Sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Riskesdas besar. 2. Kepatuhan penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan secara rutin setiap bulan rendah.	1. Meningkatkan kepatuhan penderita Hipertensi untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke Puskesmas. 2. Memberikan KIE kepada Masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap pelayanan Kesehatan usia produktif.
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	1. Penemuan ODGJ dilayanan belum maksimal. 2. Kompetensi Tim Kesehatan Jiwa Puskesmas belum memadai. 3. Jenis Obat yang diperlukan untuk ODGJ tidak tersedia lengkap di Puskesmas.	1. Peningkatan kapasitas tim Kesehatan jiwa Puskesmas. 2. Mengusulkan permintaan obat ODGJ ke pusat melalui provinsi.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	1. Penginputan data pelayanan pasien TB (terutama di RS) tidak tepat waktu karena SDM tim TB tidak memadai 2. Mekanisme komunikasi jejaring internal RS kurang optimal.	1. Mengusulkan penambahan jumlah tim TB RS 2. Menyusun kebijakan mekanisme komunikasi jejaring internal RS.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	1. Pemeriksaan HIV pada ibu hamil yang merupakan sasaran indicator masih belum maksimal (60%) dan ibu hamil maerupakan sasaran terbesar dari total seluruh sasaran (75%) 2. Penderita TB yang melakukan tes HIV masih belum maksimal yaitu (35%) dari total sasaran, terutama di RS. 3. Masih ada pelayanan ANC yang tidak melakukan pemeriksaan HIV pada ibu hamil.	1. Mengoptimalkan standar pelayanan ibu hamil (K1) terutama untuk melaksanakan tes HIV. 2. Memperkuat koordinasi layanan TBHIV di RS 3. Meningkatkan layanan pemeriksaan HIV pada seluruh pelayanan ANC.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah kab/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 terdiri atas :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENERIMA LAYANAN DASAR	TARGET MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100% (sesuai Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100% (sesuai Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic yang akan dipenuhi)

4.3.3 Realisasi

Realisasi capaian yang mampu dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada SPM urusan Pekerjaan Umum tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KAB/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	53,330	26,431	26.899	49.56%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	53,330	46,459	6,871	87.12%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Singkawang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.438.617.931
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.438.617.931
		Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.438.617.931
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.403.872.245
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.403.872.245
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2.403.872.245

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum:

PNS = 61 orang

P3K = 8 orang

Non-PNS = 51 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

- Permasalahan:
  1. Jumlah Sumber mata air yang terbatas dibandingkan peningkatan jumlah penduduk di kota singkawang
  2. Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase
  3. Tidak adanya akses untuk memasang pipa pada bahu jalan
- Solusi:
  1. Memberikan sosialisasi penggunaan air bersih yang bersumber PDAM kepada masyarakat yang masih terbiasa menggunakan air selain dari PDAM;
  2. Pemerintah Kota Singkawang khususnya Perumda/PDAM Kota Singkawang hendaknya menyusun kembali program untuk melaksanakan program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) seperti yang pernah dilasanakan tahun sebelumnya.
  3. Pemerintah Kota Singkawang hendaknya memaksimalkan program pemasangan pip distribusi agar pelayanan dapat lebih maksimal;
  4. Pemerintah harus menyediakan lahan untuk pemasanan Pipa;
  5. Kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber air baku;
  6. Dalam pembangunan jalan, drainase jalan, tiang listrik dan pagar rumah warga harus saling koordinasi;
  7. Perlu penambahan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA)
  8. Memperluas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Pipa;
  9. Pelestarian Sumber Air Baku.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- Permasalahan:
  1. Penyedia sanitasi; Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, berupa tangki septik bak kedap air untuk mengolah air limbah berbentuk empat persegi panjang

atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapa dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan. (Lampran Permen PUPR No 29/PRT/2018);

2. Sulit untuk mendata penduduk Kota Singkawang yang tidak memiliki sanitasi;
3. Kesulitan dalam proses pekerjaan dikarenakan lokasi berada pada bukit/gunung

- Solusi:
  1. Upaya pencapaian penyedia sanitasi yang sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota Singkawang harus melakukan:
     a. Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
     b. Sosialisasi pembangunan instalassi pengolahan lumpur tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai standar teknis yang berlaku;
     c. Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.
  2. Agar dianggarkan untuk pendataan;
  3. Pelaksanaan pekerjaan diusahakan dilaksanakan pada awal tahun untuk antisipasi menghindari musim penghujan;
  4. Pemerintah mengusahakan pembebasan lahan masyarakat;
  5. Mengoperasikan IPLT yang ada.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman daerah kab/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 terdiri atas :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Oleh Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Adapun Realisasi Capaian SPM Daerah Tahun 2024 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada SPM bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 %	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100 %	0 %

4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam mendukung SPM Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 di anggarkan melalui APBD Tahun 2024 serta pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISPERKIMTA dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**123.067.360**
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**82,388,340**
	1) Sub Kegiatan Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	59,779,820
	2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	11,126,980
	3) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11,481,540
2.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**40,679,020**
	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	28,094,620
	2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4,998,920
	3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	4,998,920
	4) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,586,560

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat, khususnya pada bidang perumahan :

a. ASN = 7 (tujuh) orang; dan

b. Non ASN = 4 (tiga) orang.

dari sejumlah 30 orang ASN dan 14 orang Non ASN pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang).

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Pelaksanaan Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota pada Tahun 2024 hanya sampai pada tahap identifikasi, sedangkan

target dan realisasi pelaksanaan fisik sampai akhir tahun tidak ada/tidak terealisasi;

2. Pada tahun 2024 penanganan rumah bagi korban bencana melalui partisipasi aktif warga / swadaya masyarakat, dan Pagu Anggaran terkait Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dialokasikan pada APBD dalam DPA DISPERKIMTA tidak dapat terealisasikan. Di samping itu, sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana merupakan antisipasi/siaga terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin. Bencana yang tidak bisa diprediksi sedangkan administrasi. memerlukan waktu relatif cukup lama disebabkan proses administrasi harus dipenuhi untuk pemberian atau penyaluran bantuan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya;
3. Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu dan sulit diprediksi, potensi kejadian bencana antara lain; angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan. Dan dari aspek pencegahan maupun penanggulangan belumlah maksimal dalam mengantisipasi/mengatasi potensi bencana dan penanggulangan Bencana tersebut, Disamping upaya dari Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah dan juga diperlukan upaya bersama melibatkan Peran serta masyarakat/Dunia Usaha akan perihal tanggap/kesiapsiagaan bencana.

b. Solusi yang ditempuh sebagai berikut:

1. Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota merupakan anggaran kegiatan yang bersifat antisipasi/kesigapan secara rutin dianggarkan setiap tahunnya;

2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait lainnya, serta meningkatkan sosialisasi dan mendorong masyarakat yang terkena bencana agar melengkapi berkas admin sesuai SOP guna mempercepat proses admin agar penyaluran bantuan dapat terpenuhi tepat sasaran sesuai kriteria penerima manfaat;
3. Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kab/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 terdiri atas :

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Pelayanan informasi rawan bencana;
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang Trantibumlinmas pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET PENERIMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	100% (sesuai Jumlah warga negara yang memperoleh layanan yang akan dipenuhi)
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (sesuai Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)
3	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (sesuai Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET PENERIMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (sesuai Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% (sesuai Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)

4.5.3 Realisasi

Adapun realisasi pencapaian pelayanan dasar pada bidang Trantibumlinmas tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sub Urusan Trantibum dan Damkar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET DAERAH	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Jumlah warga 259egara yang memperoleh layanan dibagi jumlah warga yang terkena dampak akibat penegakan PERDA dan PERKADA	= 46 X 100% 46 = 100%	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Korban kebakaran bangunan yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dibagi dengan jumlah korban kebakaran dan bangunan dikali 100&	= 26 X 100% 26 = 100 %	100%

Sub Urusan Bencana

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	40 Orang	500 Orang	1.250 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	78.116 Orang	500 Orang	0,64 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	57 Orang	57 Orang	100 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

Guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang TRANTIBUMLINMAS, Pemerintah Kota Singkawang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan anggaran sebagai berikut:

Sub Urusan Trantibum dan Damkar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	926.527.000,00
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	10.000.000,00

Sub Urusan Bencana

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	103.923.278,00
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.459.317.767,00
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	57.900.700,00

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pengumpulan serta pengolahan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) TRANTIBUMLINMAS ini tidak terlepas dari para personil yang telah membantu dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian juga pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut:

Sub Urusan Trantibum dan Damkar

NO	INDIKATOR	PNS	KETERANGAN
1	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan PERDA dan PERKADA	80	Pejabat struktural, anggota jabatan fungsional satpol pp, dan staf fungsional umum
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3	Untuk Bidang Damkar Personil yg ada 1 orang Kabid, 1 orang Kasi dan 1 orang Analis Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang tidak memiliki personil pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang hanya dapat melakukan fungsi koordinasi dalam bentuk pengamanan saat dan pasca kejadian. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dilakukan oleh Badan Pemadam Kebakaran Swasta.

Catatan :

- 64 anggota Jafung satuan polisi pamong praja
- 16 pejabat struktural dan staf fungsional umum

Sub Urusan Bencana

Jumlah personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 18 orang dengan rincian :

- Struktural (PNS) : 12 orang
- Non PNS : 6 orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Cakupan Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum:

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih kurang nya personil yang ada	Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tersedianya SDM yang berkualitas yang menjadi pemikir, perencana dan penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.	Memberikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja.
Masih kurang faham nya dan masih minimnya kesadaran masyarakat untuh mematuhi PERDA dan PERKADA, masih banyak nya PKL diruas jalan yang dilarang untuk berjualan.	memberikan himbauan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui media famplet, spanduk dan patroli monitoring keliling.
Belum optimalnya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda	Melakukan usulan penambahan PPNS serta regulasi yang sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan permasalahan konkuren yang dihadapi oleh “pelaksana” penegakan Perda

b. Cakupan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran:

PERMASALAHAN	SOLUSI
Tidak ada nya aparatur	Membuat rumah jabatan untuk personil

pemadam kebakaran	aparatur pemadam kebakaran
PERMASALAHAN	**SOLUSI**
Pencatatan yang kurang lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor
Sistem pelaporan yang belum optimal	Melakukan pembinaan kepada yang menangani laporan
Tidak adanya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada milik swasta

c. Cakupan Permasalahan dan Solusi Pelayanan Informasi Rawan Bencana

NO	PEMASALAHAN	SOLUSI
1	Minimnya Personil dalam penanggulangan bencana dan administrasi penanggulangan bencana	Perlunya penambahan personil lapangan dan administrasi penanggulangan bencana akan menunjang kinerja BPBD Kota Singkawang agar lebih baik dan administrasi terorganisasi dengan baik
2	Kebutuhan Pemenuhan Anggaran	Peningkatan/penambahan anggaran
3	Belum Terealisasinya Dokumen Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang dan Dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2023-2027;	Belum adanya ketersediaan dokumen Pengurangan Resiko Bencana dan dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sehingga BPBD Kota Singkawang masih menggunakan Dokumen tahun sebelumnya;
4	Adanya Proses perubahan anggaran	Percepatan pada tahapan proses pembahasan APBD
5	Jumlah SDM BPBD yang memiliki sertifikat barang/ jasa masih sedikit sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa;	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ karyawati BPBD untuk mengikuti pelatihan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

NO	PEMASALAHAN	SOLUSI
6	Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana	Perlu peningkatan dalam optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
7	Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD;	Penambahan jumlah personil PNS/ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun diklat fungsional/bimtek;
8	Kemampuan Personil dalam kualitas dan kualitatif masih kurang	Perlu peningkatan dalam Kemampuan Personil baik kualitas maupun kualitatif

d. Cakupan Permasalahan dan Solusi Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

NO	PEMASALAHAN	SOLUSI
1	Kurangnya Personil dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Perlu melakukan penambahan personil dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam kegiatan di lapangan maupun administrasi.
2	Kebutuhan Pemenuhan Anggaran	Peningkatan/penambahan anggaran
3	Rendahnya kesadaran masyarakat, Dunia Usaha untuk berperanserta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;	Peningkatan kesadaran masyarakat, Dunia Usaha untuk berperan serta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
4	Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana	Perlu peningkatan dalam optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana

NO	PEMASALAHAN	SOLUSI
5	Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD;	Penambahan jumlah personil PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun diklat fungsional/bintek;
6	Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;	Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
7	Jumlah SDM BPBD yang memiliki sertifikat barang/ jasa masih sedikit sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa;	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ karyawati BPBD untuk mengikuti pelatihan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
8	Kemampuan Personil dalam kualitas dan kualitatif masih kurang	Perlu peningkatan dalam Kemampuan Personil baik kualitas maupun kualitatif

e. Cakupan Permasalahan dan Solusi Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No	Pemasalahan	Solusi
1	Kurangnya Personil yang berkompeten dalam bidang KL dan RR BPBD Kota Singkawang	Perlu adanya penambahan personil dalam bidang yang bersangkutan baik personil lapangan maupun dalam administrasi.
2	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Perlu peningkatan dalam Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3	Kebutuhan Pemenuhan Anggaran	Peningkatan/penambahan anggaran

No	Pemasalahan	Solusi
4	Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;	Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
6	Sarana dan Prasarana yang dimiliki kurang memadai dalam pelayanan evakuasi	Perlu peningkatan dalam Sarana dan Prasarana
7	Jumlah SDM BPBD yang memiliki sertifikat barang/ jasa masih sedikit sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa;	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ karyawati BPBD untuk mengikuti pelatihan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial daerah kab/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 terdiri atas :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENERIMA LAYANAN DASAR	TARGET MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100% (sesuai jumlah warga negara yang akan dipenuhi)
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100% (sesuai jumlah anak yang akan dipenuhi)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100% (sesuai jumlah warga negara yang akan dipenuhi)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100% (sesuai jumlah warga negara yang akan dipenuhi)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100% (sesuai jumlah warga negara yang akan dipenuhi)

4.6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Layanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM
		Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kab/Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

NO	Jenis Layanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM
		Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kab/Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	398	739	53,86 %	120	398	331, 67%	192,77 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	255	405	62,96 %	59	255	432, 20%	247,58 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	420	391	107, 42%	91	420	461, 54%	284,48 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	10	6	166, 67%	10	10	100%	133,33 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	242	242	100%	600	242	40,33 %	70,17%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2024 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp) Tahun 2024
1	APBD	**581.155.156**
2	APBN/APBD Provinsi	
	- Kebencanaan Alam	Barang
	- Kebencanaan Sosial	Barang
	- ASLUT	Barang
	- ASPDB	
3	Sumbangan Pihak Donatur Bagi PMKS	
	- Baznas	barang
	- Masing- masing Yayasan	barang
Jumlah		**581.155.156**

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

a. ASN dan PTT dengan jumlah 9 orang, terdiri dari :
   1) Kepala Dinas sebanyak 1 orang
   2) Sektretaris Dinas sebanyak 1 orang
   3) Kasubag PEKK sebanyak 1 orang
   4) Peksos Bidang RPJS sebanyak 5 orang
   5) PTT Bidang RPJS sebanyak 1 orang

b. Non ASN / PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), dengan jumlah 33 orang, terdiri dari :
   1) Peksos Pendamping Sosial sebanyak 8 orang
   2) Taruna Siaga Bencana/TAGANA sebanyak 25 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam rangka penyesuaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :
  a. Belum semua indikator Rehabilitasi Bidang Sosial yang merupakan elemen SPM dapat terlayani, kerena keterbatasan kemampuan keuangan daerah;
  b. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sangat besar serta beragamnya jenis PPKS;
  c. Terbatasnya/kurangnya SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PPKS tertentu;
  d. Perlunya perbaharuan pendataan untuk verifikasi/ validasi data yang sudah ada;
  e. Minimnya fasilitasi pendukung prasarana seperti selter/ rumah singgah;

f. Selain permasalahan yang berasal dari internal ada juga permasalahan eksternal yang menjadi kendala dalam penanganan PPKS, misalnya mental PPKS yang tidak mau berubah dan identitas kependudukan PPKS yang bukan warga singkawang.

- Untuk menghadapi permasalahan/kendala dalam penyesuaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada beberapa solusi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
  a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk penanganan PPKS lebih lanjut;
  b. Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  c. Melakukan MoU dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terkait dengan penanganan PPKS Disabilitas Mental;
  d. Peningkatan kualitas PSKS yang ada agar pelayanan dan penanganan terhadap PPKS lebih optimal;
  e. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS;
  f. Mengevaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPM bidang sosial baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran;
  g. Bekerja sama dengan yayasan/pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang sosial dalam penanganan PPKS.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**261,880,763,908.45**	**247,825,472,562.37**	**94.63%**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**87,175,274,579.00**	**85,784,181,277.37**	**98.40%**
1.	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**53,060,033,223.00**	**52,251,193,202.32**	**98.48%**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,426,022,230.00	5,176,005,800.00	95.39%

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	182,000,000.00	181,515,100.00	99.73%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100,000,000.00	99,557,700.00	99.56%
	Pengadaan Mebel Sekolah	2,464,735,620.00	2,433,828,700.00	98.75%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	12,729,730,104.00	12,717,113,100.00	99.90%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	999,909,899.00	978,450,000.00	97.85%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	196,640,210.00	184,685,000.00	93.92%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	181,807,200.00	167,352,500.00	92.05%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27,067,780,000.00	26,768,520,727.32	98.89%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	43,684,500.00	39,358,500.00	90.10%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	177,147,500.00	170,451,875.00	96.22%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,449,812,340.00	2,309,035,800.00	94.25%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	52,480,800.00	42,962,800.00	81.86%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	164,332,820.00	161,367,000.00	98.20%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	823,950,000.00	820,988,600.00	99.64%
2.	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**28,384,961,970.00**	**27,895,785,925.05**	**98.28%**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,724,658,670.00	3,655,797,550.00	98.15%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,301,760,080.00	2,031,890,500.00	88.28%
	Pengadaan Mebel Sekolah	352,379,860.00	345,256,800.00	97.98%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6,626,731,110.00	6,622,076,670.00	99.93%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	445,938,200.00	432,055,000.00	96.89%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	198,273,410.00	187,535,100.00	94.58%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	93,325,460.00	87,341,500.00	93.59%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14,456,260,000.00	14,362,300,155.05	99.35%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26,548,960.00	26,131,500.00	98.43%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	71,984,820.00	70,551,000.00	98.01%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	87,101,400.00	74,850,150.00	85.93%
3.	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**	**4,615,886,764.00**	**4,563,359,850.00**	**98.86%**
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	500,499,841.00	497,115,500.00	99.32%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	218,404,100.00	217,240,500.00	99.47%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	353,404,100.00	351,272,000.00	99.40%
	Pengadaan Mebel PAUD	38,621,400.00	38,182,000.00	98.86%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	24,476,150.00	24,127,550.00	98.58%

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	PAUD			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	342,841,313.00	327,161,850.00	95.43%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,163,990,000.00	2,153,170,800.00	99.50%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	103,597,390.00	103,062,800.00	99.48%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26,928,130.00	25,959,000.00	96.40%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	41,091,550.00	39,627,400.00	96.44%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25,176,240.00	23,255,300.00	92.37%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	188,719,710.00	175,530,750.00	93.01%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	588,136,840.00	587,654,400.00	99.92%
4.	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDKAN NON FORMAL / KESETARAAN**	**1,114,392,622.00**	**1,073,842,300.00**	**96.36%**
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	242,566,380.00	231,060,700.00	95.26%
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	802,580,000.00	779,100,000.00	97.07%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	18,610,442.00	16,902,300.00	90.82%
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50,635,800.00	46,779,300.00	92.38%

4.7.2 Urusan Kesehatan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.859.686.292**	**1.777.528.696**	**95.58**
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	237.883.200	228.953.720	96.25
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97.808.400	87.813.854	89.78
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.814.400	22.233.580	
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.982.800	15.497.260	96.96
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	489.366.800	473.509.555	96.76
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	115.216.930	112.080.811	97.28
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	43.230.180	36.627.637	84.73
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.540.000	12.540.000	100
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.960.000	3.949.440	99.73

10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000	11.700.000	97.50
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	685.883.582	656.223.000	95.68
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	122.000.000	116.399.839	95.41

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**4.040.224.820**	**4.025.755.040**	**99,64**
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.360.064.940	3.348.744.170	99,66
	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.922.750.720	1.917.700.190	99,74
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	1.437.314.220	1.431.043.980	99,56
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	680.159.880	677.010.870	99,54
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	426.891.190	425.146.310	99,59
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	253.268.690	251.864.560	99,45
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**12.729.752.150**	**12.693.969.880**	**99,72**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.729.752.150	12.693.969.880	99,72
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.288.139.500	7.271.011.640	99,76
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.762.532.660	2.755.645.860	99,74
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.679.079.990	2.667.312.380	99,56
3.	**PROGRAM PENYELENGARA JALAN**	**34.304.471.671**	**33.900.959.752**	98,82
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	34.304.471.671	33.900.959.752	98,82
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	645.954.380	637.509.009	98,69
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	4.281.617.514	4.256.707.201	99,42
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	25.658.277.010	25.358.557.979	98,83
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	30.000.000	27.443.500	91,48
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	813.562.518	757.906.450	93,16
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.875.060.249	2.862.835.613	99,57
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**63.216.622**	**34.962.000**	**55,31**
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.945.000	15.836.400	99,32
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	15.945.000	15.836.400	99,32

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	47.271.622	19.125.600	40,46
	Sub Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	47.271.622	19.125.600	40,46
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**10.438.617.931**	**10.334.973.827**	**99,01**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.438.617.931	10.334.973.827	99,01
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.438.617.931	10.334.973.827	99,01
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.403.872.245**	**2.392.616.428**	**99,53**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.403.872.245	2.392.616.428	99,53
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2.403.872.245	2.392.616.428	99,53
7.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**11.381.642.760**	**11.230.693.897**	**98,67**
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.381.642.760	11.230.693.897	98,67
	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.111.814.090	10.969.429.897	98,72
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	269.828.670	261.264.000	96,83
8.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**2.137.892.950**	**2.118.016.821**	**99,07**
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.137.892.950	2.118.016.821	99,07
	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.408.621.090	1.389.828.484	98,67
	Sub Kegiatan Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	131.972.220	131.456.038	99,61
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan	597.299.640	596.732.299	99,91

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
9.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**854.840.660**	**851.072.193**	**99,56**
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	661.127.464	658.049.472	99,53
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	661.127.464	658.049.472	99,53
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	193.713.196	193.022.721	99,64
	Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	193.713.196	193.022.721	99,64
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29.460.000	29.209.650	99,15
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Investasi dan Pembangunan Daerah	29.460.000	29.209.650	99,15
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	700.313.000	682.522.472	97,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	371.892.900	369.864.018	99,45
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	328.420.100	312.658.454	95,20

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	CAPAIAN (%)
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**123.067.360**	**57.610.400**	**46.81 %**
	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	82,388,340	57.610.400	69.93 %
	1. Sub Kegiatan Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	59,779,820	57.610.400	96.37 %
	2. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	11,126,980	0	0
	3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11,481,540	0	0
	2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40,679,020	0	0
	1. Sub Kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	28,094,620	0	0
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4,998,920	0	0

	3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	4,998,920	0	0
	4.	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,586,560	0	0

4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sub Urusan Trantibum dan Damkar

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**926.527.000**	**923.481.492**	**99,67%**
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	926.527.000	923.481.492	99,67%
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (SPM)	917.700.000	915.092.992	99,72%
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (SPM	8.827.000	8.388.500	95,03%
2.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.**	**10.000.000**	**9.862.722**	**98,63%**
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10.000.000	9.862.722	98,63%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat (SPM)	10.000.000	9.862.722	98,63%

Sub Urusan Bencana

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Rp.103.923.278,-	Rp. 98.830.050	95,10%
	Sosialisasi, Kominikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 103.923.278,-	Rp. 98.830.050,-	95,10%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp. 1.459.317.767,-	Rp. 1.314.628.348,-	90,09%
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Rp. 750.000.000,-	Rp. 748.571.828,-	99,81%
	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 298.828.119,-	Rp. 286.278.220,-	98,78%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Rp. 41.240.000,-	Rp.19.795.000,-	48,00%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 90.763.448,-	Rp. 31.969.500,-	96,95%

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Rp. 287.486.200,-	Rp. 49.567.000,-	59,83%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Rp. 57.900.700,-	Rp. 43.887.500,-	75,80%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 57.900.700,-	Rp. 43.887.500,-	75,80%

4.7.6 Urusan Sosial

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN SPM	PAGU		REALISASI		% CAPAIAN	
		KEUANGAN	TARGET	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**456,716,956**	**100%**	**451,615,174**	**100%**	99%	**100%**
	Rehabilitasi Soial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pegemis di Luar Panti Sosial	456,716,956	100%	451,615,174	100%	99%	100%
	- Pernyediaan Permakanan	184,374,117	115 orang	184,140,197	115 orang	100%	100%
	- Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spritual dan Sosial	19,198,839	20 orang	15,059,880	20 orang	78%	100%
	- Pemberian Layanan Rujukan	253,144,000	44 orang	252,415,097	44 orang	100%	100%
2	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**46,596,000**	**100%**	**37,766,700**	**81%**	81%	**100%**
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	46,596,000	100%	37,766,700	81%	81%	100%
	- Penyediaan Makanan	43,716,000	200 orang	37,766,700	242 orang	86%	100%
	- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2,880,000	32 orang	-	89 orang	0%	100%
	JUMLAH	**503,312,956**		**489,381,874**		**90%**	**100%**
3	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**15,140,000**	**100%**	**9,603,200**	**100%**	63%	**100%**
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**15,140,000**	**100%**	**9,603,200**	**100%**	63%	**100%**
	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	15,140,000	25 orang	9,603,200	25 orang	63%	100%

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN SPM	PAGU		REALISASI		% CAPAIAN	
		KEUANGAN	TARGET	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**62,702,200**	**100%**	**62,702,200**	**100%**	100%	**100%**
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**62,702,200**	**100%**	**62,702,200**	**100%**	100%	**100%**
	- Rujukan Anak-Anak Terlantar	62,702,200	27 orang	62,702,200	27 orang	100%	100%
JUMLAH		**77,842,200**		**72,305,400**		93%	**100%**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan dan Penyampaian LPPD Kota Singkawang Tahun 2024 berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang selama 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang. Laporan ini adalah sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Secara substantif, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang diharapkan dapat mencapai Tujuan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan masyarakat Singkawang yang lebih sejahtera melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Secara normatif, terdapat 24 urusan wajib, 8 urusan pilihan, 5 urusan fungsi penunjang pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Singkawang belum sepenuhnya mengacu kepada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Namun demikian, seoptimal mungkin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Singkawang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di Kota Singkawang.

PEMERINTAH KOTA

SINGKAWANG